



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

SKRIPSI

**Analisis Gerakan Politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Terhadap
Etnis Arab-Israel Dalam Pemilu Israel 2019**

Diajukan oleh:
Aditya Rianto
17323069

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

Analisis Gerakan Politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Terhadap Etnis Arab-Israel Dalam Pemilu Israel 2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
9 Maret 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Willi Ashadi, S.HI., M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A.
3. Hasbi Aswar S.IP., M.A.

Tanda Tangan



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Ristanto

NIM : 17323069

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Gerakan Politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Terhadap Etnis Arab-Israel Dalam Pemilu Israel 2019

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah Saya sebagai penulis
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yang menyatakan



Aditya Ristanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Signifikansi.....	6
1.5. Cakupan Penelitian.....	7
1.6. Tinjauan Pustaka	7
1.7. Landasan Teori/Konsep/Model	12
1.8. Metode Penelitian.....	16
1.8.1. Jenis Penelitian	16
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	17
1.8.3. Metode Pengumpulan Data.....	17
1.8.4. Proses Penelitian	17
BAB II	18
Etnis Arab-Israel sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Israel masa pemerintahan Netanyahu	
2.1. <i>Speech Act</i> Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2015 terhadap etnis Arab-Israel.....	18
2.2. <i>Speech Act</i> Perdana Menteri Netanyahu terhadap etnis Arab-Israel dalam kampanye Pemilu April 2019.....	22
2.3. <i>Speech Act</i> Perdana Menteri Netanyahu terhadap etnis Arab-Israel dalam kampanye Pemilu September 2019.....	31
2.4. Etnis Arab-Israel sebagai ancaman terhadap <i>political, societal sector</i> Israel menurut Netanyahu	36
BAB III	41
<i>Emergency Action</i> Pemerintah Israel era Netanyahu terhadap warga Arab Israel	

3.1. Pengesahan <i>Basic Law Jewish Nation State</i> sebagai <i>Emergency Action</i> pemerintah Israel terhadap warga Arab Israel masa kampanye pemilihan umum 2019	41
3.2. Kedaulatan Israel dan kependudukan atas Golan Height sebagai gerakan politik pada Pemilu 2019.....	45
3.3. Skandal kasus korupsi Netanyahu dan pemilihan umum Israel 2019	46
3.4. <i>Breaking free of rules</i> sebagai tahap terakhir kesuksesan sekuritisasi menurut Buzan	49
BAB IV	53
PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran dan Masukan	56



Daftar Lampiran

Tabel 1. Pertumbuhan populasi Etnis Arab Israel tahun 2009, 2014 dan 2020 ..	2
Tabel 2. Hasil perolehan suara Pemilu Knesset 9 April 2019.....	30
Tabel 3. Hasil perolehan suara Pemilu Knesset 17 November 2019	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belakangan ini Timur Tengah menjadi kawasan yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai peneliti dan dikaji dalam forum internasional, dalam setiap minggu hampir selalu ada *headline* berita yang memberitakan isu-isu terkait permasalahan di kawasan tersebut, Timur Tengah menjadi kawasan yang menarik untuk dibahas karena berbagai faktor, mulai dari kekayaan sumber daya energi yang melimpah, hingga keragaman etnis dan budaya, juga agama yang ada di Timur Tengah, serta polemik yang menyertainya, dan salah satu negara Yahudi yang cukup mencuri perhatian di kawasan Timur Tengah yaitu Israel.

Israel sebagaimana kebanyakan negara lainnya di dunia, menganut sistem politik demokrasi, di mana setiap rakyat memiliki hak suara untuk memilih partai-partai politik yang mengusung calon Perdana Menteri yang akan menjalankan roda pemerintahan di Israel, yang menjadikan Israel sebagai salah satu negara demokratis di kawasan Timur Tengah di tengah negara-negara Arab dengan sistem pemerintahan monarkinya. Semenjak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, luas wilayah dan jumlah penduduk Israel yang terdiri dari berbagai etnis terus berkembang, namun demokrasi yang sedang berjalan di Israel tidaklah demokrasi yang seutuhnya, di mana masih ada kelompok minoritas yang direndahkan dan kelompok mayoritas ditinggikan, demokrasi yang mengutamakan etnis tertentu. (Smootha S. , *The Arab Minority in Israeli Politics: Between 'Ethnic Democracy' and 'Democratic Integration'*, 2002)

Sebagai negara Yahudi yang terletak secara geografis di kawasan Timur Tengah, penduduk Israel tidaklah hanya terdiri dari orang-orang Yahudi saja, sekitar 20% dari total jumlah keseluruhan penduduk Israel adalah orang-orang Arab, baik dari golongan pemeluk agama Islam maupun Nasrani, dan populasi etnis minoritas Arab Israel terus meningkat setiap tahunnya seperti yang dijelaskan tabel di bawah ini :

Table 1. Pertumbuhan populasi Etnis Arab Israel tahun 2009, 2014 dan 2020

	2009		2014		2020	
	Jumlah	% Total	Jumlah	% Total	Jumlah	% Total
Ultra-Orthodox	750.000	10%	911.000	11%	1.175.000	13%
Other Jews	5.267.000	70%	5.560.000	68%	5.695.000	61%
Arab Israelis	1.536.000	20%	1.713.000	21%	1.956.000	21%
Total	7.553.000	100%	8.184.000	100%	8.826.000	100%

(Latest Population Statistics for Israel, *Jewish Virtual Library. n.d.*)

Gambar diatas menunjuk populasi penduduk Arab Israel yang semakin meningkat setiap tahunnya dan merupakan satu perempat dari total keseluruhan penduduk Israel, kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai kelompok minoritas di suatu negara Yahudi yang berada di sekitar negara-negara Arab di Timur Tengah. Kondisi Israel sebagai negara Yahudi yang terletak di kawasan Timur Tengah tentunya berdampak pada heterogenitas masyarakat yang ada di Israel itu sendiri. (Waxman, 2019)

Etnis Arab sebagai kelompok minoritas di Israel tentunya memiliki sikap tersendiri terhadap konflik yang sedang berjalan antara Israel dan Palestina, walaupun mereka secara kewarganegaraan adalah penduduk sah Israel, dan memiliki hak dan suara yang sama dengan penduduk Yahudi di Israel, sering kali kelompok minoritas Arab yang terdiri dari pemeluk agama Islam dan Nasrani

tersebut banyak mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina baik secara militer maupun politik, dan menyatakan dukungan mereka secara terang-terangan terhadap kemerdekaan Palestina dalam bentuk aksi-aksi massa seperti demonstrasi.

Meskipun etnis Arab-Israel disebut sebagai kelompok minoritas, 20% dari total jumlah penduduk di Israel bukanlah jumlah sedikit, jika dikaitkan dengan konsep demokrasi di mana setiap suara bernilai, kelompok-kelompok minoritas sering kali dimanfaatkan dan memiliki pengaruh tertentu dalam jalannya kontestasi politik di Israel di mana banyaknya partai yang turut berkompetisi dalam pemilihan umum untuk menduduki kursi parlemen ingin memperebutkan setiap suara dari berbagai golongan kelompok masyarakat Israel, terlepas dari apa etnis bahkan agama yang dipeluknya karena setiap orang sama-sama memiliki satu suara dalam proses pemilihan umum.

9 April adalah pertama kali Pemilu pada tahun 2019, Israel adalah negara demokrasi parlementer, dengan pemerintahan yang di bentuk oleh koalisi multi partai. 120 kursi parlemen Israel di isi menurut representasi proporsional, namun pada hasil Pemilu April 2019 tidak ada koalisi yang mencukupi kriteria memenuhi minimal 61 suara kursi Knesset untuk dapat membentuk pemerintahan baru di Israel sehingga diadakan Pemilu ulang pada 17 November 2019 untuk kembali melakukan proses Pemilu Ulang (Raoul Wootliff, 2019).

Pada pemilihan umum ulang yang dilakukan pada September 17, 2019 di Israel, terjadi persaingan yang cukup sengit antara partai Likud yang mencalonkan Netanyahu sebagai pertahana, dan partai Kahol Lavan yang mendukung calon

Perdana Menteri Benny Gantz, dikarenakan partai pengusung Netanyahu kalah satu kursi dibandingkan dengan partai oposisi Kahol Lavan, yang berarti dapat menjadi suatu ancaman bagi posisi Netanyahu yang telah menjabat selama empat periode dan sedang berusaha untuk menduduki kembali kursi Perdana Menteri Israel pada pemilu tahun 2019. (Ayyub, 2019)

Partai Likud dan Kahol Lavan terlihat memiliki perhatian tersendiri terhadap kelompok minoritas yang ada di Israel seperti Arab dan ultra-Orthodox, seperti partai Likud sebagai partai yang mengusung calon Perdana Menteri Netanyahu bersikap dan memandang dengan cara yang negatif terhadap etnis Arab-Israel, dan bahkan mengutarakan kalimat-kalimat bahwa orang Arab di Israel akan menghancurkan Israel, dan keberadaan anggota Parlemen Knesset etnis Arab akan berdampak pada kehancuran Israel, Gantz sebagai calon Perdana Menteri yang diusung partai Kahol Lavan pun berpandangan bahwa kelompok ultra-Orthodox di Israel hanya pandai memeras kekayaan Israel untuk kepentingan mereka sendiri, dan menolak adanya sekularisasi, keadaan yang sama-sama melibatkan dua kelompok minoritas dan dua kelompok partai politik untuk memperoleh suara di kursi Parlemen Israel. (Benn, 2019)

Identitas dalam konstestasi pemilu di Israel masih menjadi isu yang banyak dapat mendatangkan keuntungan bagi partai-partai politik, karena keberagaman etnis yang ada di Israel seperti Arab-Israel, ultra-Orthodox, Druze, Samartians dan lainnya dapat menjadi pengaruh penting terhadap pemungutan pemilihan suara dalam pemilu, dan pada pemilu ulang yang dilakukan tahun 2019 terlihat pihak partai Kahol Lavan mencoba memojokkan kelompok ultra-Orthodox untuk kepentingan mereka, sedangkan partai Likud seperti pemerintahan

sebelumnya mencoba untuk mengambil keuntungan dengan memojokkan kelompok minoritas Arab di Israel, dan dengan janji-janjinya untuk terus mengembangkan wilayah Israel dengan melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina.

Netanyahu dalam kampanye yang dilakukannya untuk mendapatkan suara dan dukungan dari masyarakat Israel, banyak menggunakan cara-cara yang terkesan rasis terhadap kelompok minoritas Arab-Israel, seperti pada tahun 2018 yang lalu pemerintah Netanyahu mengesahkan undang-undang Jewish Nation-State yang dalam Undang-Undang menjadikan kelompok selain bangsa Yahudi di nomor duakan, atau di anak tirikan, namun hal tersebut dalam pemilu kali ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh banyak, di mana jumlah pemilih dari etnis Arab di Israel meningkat, meskipun banyak dari kampanye yang dilakukan oleh Netanyahu bersikap rasis dan memojokkan etnis Arab-Israel, meski begitu partai koalisi Arab-Israel dapat menduduki posisi ke tiga perolehan kursi di Parlemen dalam hasil pemungutan suara yang dilakukan. (Holmes, 2019)

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Netanyahu sebelumnya membentuk suatu *frame* terhadap etnis Arab-Israel, bahwa mereka dapat membahayakan keberlangsungan negara Yahudi Israel, dan menjadikan kelompok minoritas tersebut suatu persoalan yang dapat mengancam keamanan negara, hingga harus mendapatkan perlakuan khusus. Tentunya keputusan yang di buat oleh pemerintahan Netanyahu memiliki alasan tersendiri mengapa harus memperlakukan minoritas Arab-Israel dengan berbeda dari kelompok lainnya yang ada di Israel, dan apa hubungannya dengan kontestasi pemilu yang sedang terjadi pada tahun 2019.

Tulisan ini akan mencoba untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan sikap yang diambil oleh Perdana Menteri Netanyahu terhadap etnis Arab-Israel menggunakan teori Sekuritasasi, mengingat perkataan presiden pertama Israel tentang bagaimana kelak suatu negara Yahudi akan diperlakukan di dunia, seperti yang dikatakan oleh Chaim Weizman, “aku yakin bahwa dunia akan menghakimi Jewish State sesuai bagaimana perlakuan mereka terhadap bangsa Arab”. (Neuberger, 2004)

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana gerakan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap etnis minoritas Arab-Israel dalam pemilihan umum Israel tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi demokrasi yang sedang berjalan di tengah keragaman etnis di Israel
2. Menganalisis peran kelompok minoritas Arab-Israel dalam kontestasi politik Israel 2019
3. Menganalisis kampanye politik Benjamin Netanyahu dan kebijakannya terhadap etnis Arab-Israel dalam Pemilu 2019

1.4. Signifikansi

Penulis mencoba untuk meneliti bagaimana Pemerintah Israel era Netanyahu dan dampak kebijakan-kebijakan yang dibuat terhadap etnis Arab-Israel sebagai kelompok minoritas di tengah negara demokratis Israel, dan kaitannya dengan kontestasi politik Israel tahun 2019, di mana suara kelompok minoritas juga

turut diperebutkan berbagai partai politik di Israel untuk dapat memenuhi kursi parlemen, Knesset. Tulisan ini juga bertujuan melengkapi dan mengisi kekurangan penelitian terdahulu yang telah banyak menjelaskan jalannya demokrasi di Israel, namun sejauh yang penulis temukan belum ada tulisan spesifik yang mengarah kepada pembahasan terhadap peran etnis Arab-Israel dalam kontestasi politik Israel terutama pada pemilu Israel tahun 2019, dan hubungan konflik antara Perdana Menteri Netanyahu dan etnis minoritas Arab-Israel.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada area yang hanya membahas permasalahan domestik Israel dalam rentang waktu tahun 2019 di mana tahun tersebut adalah waktu Benjamin Netanyahu sedang menjabat sebagai Perdana Menteri, serta batasan topik pada demokrasi Israel, kontestasi politik Israel, dan hubungan etnis Arab-Israel dengan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan yang akan dibahas di bawah ini, pembahasan terkait demokrasi yang tengah berjalan di Israel adalah salah satu hal yang utama, sebab Israel adalah negara Yahudi dan negara dengan sistem demokrasi di saat yang sama dengan keragaman etnis dan agama dalam masyarakatnya, tulisan yang dibuat oleh Sammy Smooha pada tahun 2002, dalam tulisan Sammy Smooha memaparkan dengan sangat baik dan komperhensif terkait isu-isu dalam demokrasi yang berjalan di Israel, Smooha sendiri dalam tulisannya tersebut tidak melabelkan Israel sebagai negara demokrasi, melainkan etnis demokrasi, bahwa demokrasi yang berjalan di dunia barat, Eropa dan Amerika berbeda dengan demokrasi yang berjalan di Israel, tidak adanya kesetaraan hak yang dapat diperoleh oleh semua masyarakat Israel,

melainkan hanya kelompok mayoritas Yahudi yang mendapatkan banyak keistimewaan yang diberikan negara (Smooha, 2002). Pentingnya untuk memahami bentuk sistem pemerintahan yang sedang berjalan di Israel sebab dalam tulisan ini juga akan berupaya menganalisis konflik internal Israel antara Pemerintah Israel era Perdana Menteri Netanyahu dan etnis minoritas Arab-Israel.

Yoav Peled dan Doron Navot dalam tulisannya berjudul *On the State of Democracy in the Jewish State* pada tahun 2005 yang dimuat pada *Israel Studies Forum*, juga membahas hal yang sama dengan apa yang dipaparkan Smooha pada tulisan sebelumnya, terkait demokrasi yang berjalan di Israel, dalam tulisannya mengutip argumen Fareed Zakaria, bahwa setelah selesainya perang dingin, demokrasi akan berkembang dengan pesat di dunia, namun tidak halnya dengan liberalisme, melihat arti sempit demokrasi bahwa setiap negara punya hak suara dan adanya pemilihan umum di suatu negara, namun dengan adanya hal tersebut tidak menjamin masyarakat dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi mendapat hak yang adil dan setara yang diperoleh seluruh masyarakat, contoh kasus dalam tulisan tersebut adalah dengan apa yang terjadi di Israel.

Dalam tulisan tersebut juga mengutip argumen Yiftachel yang menyinggung pendapat Smooha sebelumnya terkait Israel sebagai etnis demokrasi, Yiftachel lebih setuju untuk menyebut Israel sebagai etnokrasi (*ethnocracy*) daripada etnis demokrasi seperti apa yang menjadi pendapat Smooha, sebab menurut Yiftachel, negara Israel diperintah atau dipimpin oleh etnis tertentu, Yahudi, bukannya warga Israel (*Israeli Demos*), dan apa yang sedang terjadi di Israel sedang mengarah pada *majoritarianism*, di mana struktur tirani dikuasai oleh kelompok etnis mayoritas tertentu. Analisa yang baik menurut penulis dalam jurnal

yang ditulis oleh Peled dan Navot tersebut, di mana dapat menganalisis sistem pemerintahan Israel ke depan, dengan beranggapan bahwa Israel yang di dalamnya terdapat berbagai macam etnis termasuk Arab-Israel, dan itu menjadi salah satu ujian bagi suatu negara Yahudi dan negara demokrasi Israel. Peled dan Navot beranggapan bahwa upaya liberalisasi yang terjadi di Israel pada tahun 90-an tidak akan berjalan dengan sempurna, dan tidak akan menjadikan Israel negara demokrasi liberal seperti negara barat, namun justru mengarahkan Israel lebih kepada bentuk perubahan di mana suatu negara dikuasai oleh kelompok etnis mayoritas, yaitu etnis Yahudi (Yoav Peled, 2005). Peled dan Navot telah memaparkan dengan baik masalah demokrasi yang sedang berjalan di Israel setelah masa tahun 1990, namun masalah yang di dalamnya melibatkan pemerintah Israel saat itu yang sedang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu dan juga melibatkan etnis minoritas Arab-Israel tidak mendapat cukup banyak penjelasan dalam tulisannya, sehingga penulis ingin berusaha lebih menekankan analisis konflik yang terjadi di Israel antara pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu dan kelompok minoritas Arab-Israel.

Membahas konflik internal etnis Arab-Israel dan pemerintah Israel tentunya tidak lepas dari Palestina baik secara wilayah, maupun individu yang berada di dalam negara Israel yang di mana mereka menjadi etnis minoritas Arab-Israel, dalam tulisan Ahmad Samih Khalidi, *Why can't Palestinians recognize the Jewish state?*, memaparkan bahwa keinginan Israel untuk dapat diakui oleh warga Palestina sebagai negara Yahudi, atau tanah bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia menimbulkan penolakan bagi warga Palestina, baik para pengungsi Palestina, warga Palestina yang menjadi warga negara Israel, atau penduduk yang berada di

bawah wilayah jajahan Israel. Dalam pidato yang disampaikan Perdana Menteri Israel Netanyahu, memaksa Presiden Palestina, Mahmoud Abbas untuk menyatakan bahwa mereka mengakui adanya negara Yahudi Israel, dengan alasan untuk kebaikan kedua belah pihak dan mengakhiri konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dengan begitu Israel tidak menginginkan Palestina menjadi ancaman bagi Israel menurut Netanyahu. Hal yang disampaikan Netanyahu dapat menjadi ancaman bagi Palestina jika mengakui Israel sebagai *Jewish State*, sebab dengan begitu mengancam kepada seluruh kelompok etnis dan agama selain Yahudi yang berada dalam negara Israel, sedangkan akan semakin kuat dan berpengaruhnya etnis Yahudi sebagai mayoritas di Israel (Khalidi, 2011).

Dalam tulisan di bawah ini juga penting untuk melihat perkembangan peran etnis minoritas Arab-Israel yang terjadi di Israel, tulisan yang juga ditulis oleh Sammy Smooha pada tahun 1990 yang berjudul *Minority status in an ethnic democracy: The status of the Arab minority in Israel*, memaparkan dengan cukup baik perkembangan yang dialami dan terjadi terhadap etnis Arab-Israel. Bahwa pada awal berdirinya negara Israel pada tahun 1948 semua warga negara Israel, tanpa terkecuali termasuk etnis Arab-Israel sebagai minoritas mendapatkan kebebasan penuh sebagai warga negara, kebebasan berekspresi, hak voting, bahkan maju untuk menjadi calon legislatif, namun hingga sampai pada tahun 1990, dan saat sekarang ini, demokrasi liberal tidak dapat bertahan di Israel, dan munculnya istilah yang disebutkan sebagai etnis demokrasi yang disampaikan oleh Smooha yang merujuk pada sistem pemerintahan yang sedang berlangsung di Israel yang mengkritisi jalannya demokrasi disana (Smooha, 1990).

Penjelasan yang disampaikan oleh Smootha dalam tulisan ini cukup komperhensif terkait perkembangan pengaruh dari kelompok minoritas Arab-Israel dalam perpolitikan di Israel, namun hal yang menarik ketika Smootha memaparkan demokrasi liberal tidak dapat bertahan dengan baik di Israel pada tahun 1990, dan adanya kemunduran dalam hal demokratisasi di Israel. Mengingat penelitian Smootha tersebut terbatas hanya pada sampai tahun 1990, dan penting bagi penulis untuk melihat perkembangan demokrasi yang ada di Israel dari tahun 1990-an atau di mana ketika Netanyahu mulai menjabat sebagai Perdana Menteri sampai dengan tahun 2019.

Benjamin Neuberger dalam tulisannya memaparkan, bahwa etnis minoritas Arab-Israel pada awal berdirinya negara Israel tidak memiliki hak dan peran penting dalam jalannya roda pemerintahan di Israel meskipun mereka mendapatkan hak kewarganegaraan secara penuh dan hak untuk mengikuti pemilu, keadaan yang menurut Smootha definisikan sebagai etnis demokrasi, di mana suatu etnis dalam negara demokratis mendapatkan suatu keistimewaan khusus dibanding etnis lainnya. Neuberger berargumen bahwa Israel sedang berada dalam masa-masa tersebut (*ethnic democracy*), pada sekitar masa tahun 1950-1970, dan berargumen bahwa pada masa tahun-tahun setelahnya Israel akan memasuki masa-masa integrasi demokrasi di mana kelompok minoritas dalam suatu rezim akan semakin memiliki kekuatan dan pengaruh dalam politik pemerintahan Israel dan mulai menjauh dari keadaan sebelumnya yaitu etnis demokrasi. Namun Neuberger juga berargumen di mana sebelumnya meyakini bahwa akan terjadi suatu integrasi demokrasi yang terjadi di Israel setelah masa tahun 1970-an, melihat sejak tahun 1999 dengan apa yang terjadi di Israel, tidak mengarah dan mendekatkan Israel

dengan apa yang dia yakini sebelumnya sebagai integrasi demokrasi justru semakin menjauhkan Israel dan Neuberger menyebutkan yang terjadi di Israel setelah tahun 1999 akan menjadi suatu bentuk kegagalan dari integrasi dalam demokrasi di Israel (Neuberger, 2004).

Dari seluruh argumen dalam jurnal yang telah dipaparkan, semua berpendapat bahwa Israel sedang mengalami kemunduran dalam hal isu demokrasi yang terjadi di dalam negeri Israel pada masa setelah tahun 1990, namun kurangnya pemaparan tentang peran dari Perdana Menteri Israel Netanyahu, dan kelompok minoritas Arab-Israel juga konflik yang melibatkan keduanya, serta tahun-tahun pembahasan atau penelitian tersebut yang sudah terlampau lama, pada saat ini meninggalkan celah bagi penulis untuk meneliti dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan isu demokrasi di Israel terhadap etnis minoritas Arab-Israel, serta konflik yang terjadi dengan pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu serta hubungannya dengan Pemilihan Umum di Israel pada Tahun 2019.

1.7. Landasan Teori/Konsep/Model

Teori Sekuritisasi

Dalam menganalisis dan mencoba menjawab dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan menggunakan teori sekuritisasi, untuk meninjau dan mengelaborasi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Teori Sekuritisasi dipelopori oleh Buzan, Waever dan Wilde, dalam bukunya yang berjudul *Security: A New Framework for analysis*, Bahwa dalam analisis yang sering terjadi dalam kajian teori sekuritisasi, menunjukkan bahwa kebijakan keamanan nasional suatu negara bukanlah kondisi yang hadir secara alami,

melainkan keadaan yang dibentuk dan dirancang oleh para politisi dan penentu kebijakan yang memiliki kepentingan tertentu. (Buzan, 1998)

Dalam artikel yang ditulis Eurokhmanoff menjelaskan Teori Sekuritisasi berkembang dalam kajian studi Hubungan Internasional ketika berakhirnya Perang Dunia 2, di mana berkembangnya pandangan dalam menganalisis isu keamanan dari yang sebelumnya berfokus pada faktor militer dan politik yang mempengaruhi keamanan, bertambah hingga pada pembahasan keamanan manusia, keamanan regional, hingga budaya dan identitas.

Eurokhmanoff menjelaskan, keamanan dapat menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat suatu negara, sebab tercipta suatu kondisi di mana ada pihak yang mengelola keamanan, dan dilain pihak ada yang menikmati dan menerima keamanan itu sendiri. Contoh yang ditulis dalam artikel tersebut, dalam kampanye Global War on Terror, seseorang yang terlihat seperti orang arab dan menggunakan identitas keislaman akan dicurigai sebagai seseorang yang berbahaya, dan akan menerima perlakuan khusus di mana mereka mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari aparaturnegara, karena dari tampak dan identitasnya mereka terlihat seperti para pelaku terorisme dan diduga memiliki hubungan dengan kelompok teroris, yang dapat mengancam keamanan nasional dan masyarakat suatu negara. Bahwa gagasan utama dalam Teori Sekuritisasi tentang keamanan ialah kondisi di mana terdapat suatu hal atau kelompok yang eksistensinya terancam, dan perlu untuk dilindungi.

Terdapat lima sektor pembahasan dalam kajian Teori Sekuritisasi, sektor ekonomi, sosial, militer, politik, dan lingkungan. Di mana dalam setiap sektor dapat

mengalami atau menghadapi ancaman tertentu dari suatu objek yang mengancam sehingga hal yang dirasa terancam butuh untuk dilindungi, contoh halnya dalam sektor sosial adalah identitas, dalam sektor lingkungan ada ekosistem dan spesies flora dan fauna tertentu yang terancam punah, dalam sektor militer ada posisi kedaulatan suatu negara yang dapat menjadi terancam, dengan melakukan sektorisasi dalam kajian Teori Sekurisasi kita dapat memahami bahwa suatu ancaman nyata tidak bersifat objektif, namun memiliki karakter dan objek tertentu, dan melihat konteks kejadian dalam suatu isu ancaman dan keamanan. Dengan memahami berbagai objek referensi dalam teori sekuritisasi kita dapat bertanya dengan lebih spesifik tentang isu atau suatu permasalahan yang terjadi, keamanan untuk siapa? Keamanan dari ancaman apa? Dan keamanan yang diberikan siapa? (Eurokhmanoff, 2017, hal. 105)

Salah satu hal sentral dalam Teori Sekuritisasi adalah menunjukkan kemampuan retorikal para aktor atau pembuat kebijakan dalam membingkai suatu masalah agar dapat meyakinkan para audiens untuk mengangkat suatu isu ke atas ranah politik, itu disebut juga sebagai *speech act* dengan mengatakan kalimat tertentu, seperti bertaruh, memberikan janji-janji, memberikan label terhadap suatu kelompok. Pentingnya konsep *speech act* dalam Teori Sekuritisasi, karena dapat menunjukkan bahwa kalimat yang disampaikan para pembuat kebijakan, tidak hanya menjelaskan keadaan realitas, namun juga dapat membangun suatu realitas itu sendiri, yang dapat memicu berbagai respon dari pihak tertentu. (Buzan, 1998)

Bahwa suatu isu dapat menjadi ter-sekuritisasi ketika *audiens* atau masyarakat setuju dengan keadaan yang dirasa dapat menjadi ancaman, dan mendukung untuk segera ditindak, diatasi secepatnya dengan segala kekuatan,

namun jika *audiens* menolak *speech act* dari aktor yang melakukan sekuritisasi, maka dapat dikatakan upaya sekuritisasi yang dilakukan adalah gagal. Setiap isu keamanan dapat telah di sekuritisasikan, tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menegakkan suatu keamanan, seringkali mendapatkan legitimasi atas nama hal yang darurat, dan di bawah ancaman eksistensial, dan sering kali menjadikannya mengabaikan nilai-nilai demokratis di keadaan yang normal dengan banyaknya pengecualian.

Bila aktor sekuritisasi menyatakan dan menetapkan kepada suatu objek referensi tertentu keberadaannya terancam dengan suatu alasan, maka aktor sekuritisasi tersebut berwenang untuk melakukan suatu Tindakan yang di luar batas norma kebiasaan untuk menjamin dan memastikan keberlangsungan hidup objek referensi tersebut. Tindakan tersebut adalah aksi yang dilakukan untuk melindungi suatu objek referensi yang salah satu faktornya yaitu berasal dari ketakutan di mana suatu pihak terancam eksistensinya. Buzan kemudian menyimpulkan bahwa terdapat tiga level analisis kesuksesan dalam teori sekuritisasi yaitu, *existential threat*, *emergency action*, *breaking free of rules*. (Buzan, 1998)

Sekuritisasi yang dapat dikatakan berhasil, ketika keamanan adalah isu prioritas dalam kehidupan sosial masyarakat, ranah yang luar biasa, memberikan aktor Sekuritisasi yang biasanya adalah negara, untuk dapat bertindak melampaui nilai demokratis, dan memiliki kekuasaan untuk memanipulasi populasi. Namun Waever memandang, kesuksesan suatu Sekuritisasi tidak dinilai dari aktor yang melakukannya, melainkan ditentukan oleh *audiens* atau masyarakat. Serta penting untuk kita dapat melihat dan lebih memperhatikan pertanyaan bagaimana dalam

menganalisis Teori Sekuritisasi, bagaimana suatu keadaan, kalimat dan bahasa yang disampaikan suatu aktor dapat meyakinkan *audiens* atau masyarakat akan suatu ancaman bagi masyarakat itu sendiri? (Eurokhmanoff, 2017, hal. 107)

Dengan menggunakan pendekatan Teori Sekuritisasi dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis berkeinginan agar analisis yang dihasilkan dapat memaparkan dan menjelaskan permasalahan terkait dengan sekuritisasi yang terjadi di Israel, dalam konteks konflik hubungan Pemerintah Israel dan etnis minoritas Arab-Israel. Siapa saja aktor yang terlibat, seperti yang telah dipaparkan pada asumsi dasar teori ini sebelumnya, siapa aktor yang melakukan sekuritisasi? Sekuritas atau rasa aman terhadap apa dan siapa? Siapa yang harus dilindungi dari ancaman keamanan yang diutarakan aktor yang melakukan sekuritisasi dan bagaimana tiga level analisis dalam teori sekuritisasi yang dicetuskan oleh Buzan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini?

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis melihat pentingnya tinjauan literatur dan data-data penunjang dan berbagai penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk dapat memberikan pandangan dan referensi yang lebih mendalam dalam proses penelitian yang dilakukan, data-data yang ditemukan dapat membantu penulis untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membantu menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Tulisan ini berusaha untuk menganalisis konflik yang terjadi di Israel antara pemerintah Israel, Perdana Menteri Netanyahu dan etnis Arab-Israel sebagai kelompok etnis minoritas di Israel dan keterkaitannya dengan Pemilihan Umum Israel tahun 2019, sehingga subjek dalam tulisan ini adalah Israel sebagai negara demokratis, Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel, dan permasalahan yang terjadi dalam Pemilu Israel, serta etnis Arab-Israel sebagai subjek penelitian dalam konflik yang terjadi dalam pembahasan di penelitian ini.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1.8.4. Proses Penelitian

Data diseleksi sesuai dengan kepentingan dan memiliki keterkaitan dengan topik dalam penelitian ini, sumber primer yang di dapatkan melalui artikel atau laporan yang dikeluarkan langsung pihak pertama oleh pemerintah Israel, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan artikel berita yang memiliki kredibilitas dalam menyampaikan suatu informasi.

BAB II

Etnis Arab-Israel sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Israel masa pemerintahan Netanyahu

dengan berlandaskan pemaparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan membedah bagaimana etnis Arab-Israel sebagai warga negara Israel menjadi suatu ancaman di dalam negerinya sendiri sebagaimana yang kerap dilontarkan oleh Perdana Menteri Netanyahu dalam pernyataan-pernyataannya terutama dalam proses kampanye dan keterkaitannya dengan pemilihan umum yang terjadi di Israel pada tahun 2019 yang akan dipaparkan dalam bab ini. Serta bagaimana langkah-langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu terhadap warga negaranya sendiri yaitu etnis Arab Israel dan bagaimana narasi-narasi yang disampaikan oleh Netanyahu kepada publik menjelaskan bagaimana etnis minoritas Arab Israel adalah ancaman bagi keamanan nasional Israel melalui *Speech act*, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Waever yang mendefinisikan keamanan dalam sekuritisasi sebagai bentuk *speech act*, keamanan bukanlah suatu yang nyata melainkan bisa dibentuk, bahwa ucapan dan narasi yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi itulah yang menjadi suatu hal menjadi masalah keamanan, dengan mengembangkan suatu hal ke dalam area yang lebih spesifik dan melakukan klaim memiliki hak spesial untuk menggunakan cara apapun agar dapat mengatasi dan mencegahnya terjadi (*securiticizing*) (Roe, 2004, p. 284)

2.1. *Speech Act* Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2015 terhadap etnis Arab-Israel

Keamanan menjadi salah satu isu yang berada pada level tertinggi dalam setiap pembahasan kehidupan bermasyarakat di Israel, Israel sebagai salah satu

negara yang memiliki sistem dan menganut nilai-nilai politik demokratis di Timur Tengah, juga sebagai satu-satunya negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Yahudi ditengah-tengah negara muslim Arab seperti Mesir, Jordan, Suriah, dan Lebanon, bukan hanya letak geografis yang menjadi salah satu faktor penyebab konflik di Israel, tetapi juga konflik dalam negerinya sendiri.

Dalam rentang tahun 2000-2005 terjadi ratusan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Palestina dan serangan-serangan teroris yang mengarah kepada masyarakat Israel yang menyebabkan meninggalnya ribuan orang tak bersalah dan ribuan lainnya mengalami luka-luka atas respon tersebut pemerintah Israel pada saat itu membangun pagar yang membatasi wilayah Israel dan Tepi Barat untuk mencegah kelompok teroris masuk dengan mudah ke dalam wilayah Israel, dan Gerakan tersebut di dukung penuh oleh masyarakat Israel, meski mendapatkan kecaman dari pihak luar (international condemnation) membangun pagar, bukanlah hal yang baru karena sebelumnya pemerintah Israel telah melakukan hal yang sama dengan membatasi dan membangun pagar yang mengelilingi wilayah Gaza, dan terbukti hal tersebut dipandang efektif karena tidak ada kelompok teroris yang melakukan aksi pemboman sukses melewati batas pagar tersebut (Bard Mitchell, n.d.).

Speech Act merupakan salah satu variabel analisis dalam teori sekuritisasi yang di pelopori oleh Buzan, yang membahas kemampuan seorang aktor sekuritisasi dengan kemampuan retorikanya sebagai pembuat kebijakan, yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mendesain suatu masalah agar dapat di yakini oleh para audiens, untuk mengangkat suatu is uke atas ranah politik, yang lebih tinggi terutama masalah atas ancaman dan keamanan (Buzan, 1998).

Dalam beberapa dekade sejak populasi Arab-Israel diubah dengan sebelumnya mereka adalah mayoritas demografis menjadi minoritas di negara Israel, kelompok etnis yang sekarang menjadi minoritas tersebut, Arab-Israel terus mengungkapkan ketidakbahagiaannya dengan keadaan historis yang menyebabkan beberapa hal sebagai berikut terjadi. Protes tahun 2015 yang terjadi ditujukan pada kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Israel secara general, yang menandai populasi Arab sebagai ancaman keamanan dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sipil diantara hubungan antar etnis kelompok Yahudi dan kelompok Arab-Israel.

Hubungan antara orang Yahudi Israel dan warga minoritas Arab semakin memburuk sepanjang tahunnya semenjak kepemimpinan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri, dengan masing-masing pihak kehilangan kepercayaan dalam hidup berdampingan dan menjadi kurang toleran terhadap satu sama lain antar kelompok masyarakat di Israel yang seharusnya toleransi adalah kunci dari kehidupan masyarakat yang prural seperti keadaan sosial di Israel (Doron Matza, 2017).

Sebuah Survei atas kebijakan pemerintah sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak hanya merusak peluang solusi damai dengan Palestina di wilayah pendudukan, mereka juga semakin merusak tatanan antar komunitas di dalam Israel sendiri, menciptakan ketidakpastian. tentang masa depan hubungan antara warga Arab dan Yahudi. Sami Abu Shehadeh, mantan anggota Tel Aviv seorang dewan kota Jaffa, berkata, “Sayangnya, kami melihat pemerintah saat ini membawa kami ke situasi yang jauh lebih buruk dalam hubungannya dengan hasutan terus menerus terhadap orang Arab yang

mempengaruhi cara mayoritas Yahudi berurusan dengan minoritas Arab. Jadi, segala sesuatunya tidak terlihat menjanjikan." (Ben Lynfield, 2018)

Dari berbagai ucapan-ucapan kepada publik yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu pada tahun 2015, yang paling menyorot perhatian adalah ucapannya dalam sebuah video yang di unggah dalam akun Facebook miliknya pada saat Pemilu Israel tahun 2015, dengan mengatakan kepada masyarakat Israel bahwa pemerintah sayap kanan, yang saat itu sedang berkuasa yaitu Likud, dan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri sedang berada dalam ancaman, ancaman dari kelompok sayap kiri, orang-orang etnis Arab yang berbondong-bondong mendatangi kotak suara untuk memenuhi hal pilihnya sebagai bagian dari warga negara Israel (Hareetz, 2015).

Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Netanyahu memiliki sikap tersendiri terhadap salah satu kelompok etnis Arab Israel. Dengan cenderung mendiskriminasi kelompok tersebut dalam narasi-narasi yang disampaikannya ke publik. Terbukti dengan cara yang dilakukan oleh Netanyahu pada Pemilu 2015 dengan mendiskreditkan kelompok etnis Arab Israel, dan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap kekuasaan pemerintah sayap kanan Israel, berhasil membawa Benjamin Netanyahu memenangkan pemilu dan menjabat sebagai Perdana Menteri sebagai hasil kemenangan pada Pemilu tahun 2015. Semakin dekatnya waktu Pemilu Israel selanjutnya pada tahun 2019 penulis melihat Benjamin Netanyahu semakin giat untuk mempersiapkan strategi yang akan membawanya untuk dapat memenangkan Pemilu tersebut, dan semakin gencar melakukan Speech Act terhadap etnis Arab-Israel secara rutin dengan semakin dekatnya waktu Pemilihan Umum yang akan dilakukan pada tahun 2019.

2.2. *Speech Act* Perdana Netanyahu terhadap etnis Arab-Israel dalam kampanye Pemilu April 2019

Banyak kejadian besar lainnya yang berkaitan dengan masalah keamanan nasional Israel tentunya mempengaruhi opini umum masyarakat Israel terutama etnis mayoritas Yahudi dengan isu-isu yang berkaitan dengan masalah keamanan, salah satunya pada kontestasi politik pemilihan umum yang terjadi di Israel, masalah keamanan masih menjadi perhatian utama dalam masyarakat umum terutama mayoritas etnis Yahudi di Israel, bahkan masyarakat Israel mengapresiasi fakta bahwa Netanyahu Perdana Menteri Israel saat ini, menjaga dan menjauhkan Israel dari aksi perang secara langsung dan dapat menjaga keamanan nasional dari ancaman-ancaman pihak luar seperti Hezbollah, Iran dan Hamas (*Benjamin "Bibi" Netanyahu, n.d.*)

Bukan hanya ancaman dari pihak luar seperti Iran, Hamas dan Hezbollah, atas alasan tertentu Netanyahu juga menyatakan suatu kelompok masyarakatnya sendiri sebagai suatu ancaman, yaitu etnis Arab Israel sebagai warga negara Israel, dan itu terjadi pada kontestasi politik pemilu Israel tahun 2019. Bentuk-bentuk narasi tertentu yang dibangun oleh Netanyahu terhadap warga negara Israel etnis Arab atau biasa disebut Arab Israel adalah Tindakan *speech act* sebagaimana yang akan terjadi pada pemaparan pada bab ini. Bahwa sekuritisasi adalah tindakan secara praktik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu pada suatu isu, kondisi tertentu serta dampak yang akan ditimbulkan setelahnya, hal yang esensial adalah mengkonstruksikan suatu isu menjadi ancaman nyata sehingga dibutuhkan tindakan khusus tertentu untuk menanggulangnya dan dapat diterima, disetujui tindakan tersebut oleh *audiens* tertentu yang telah ditargetkan sebelumnya (Buzan, 1998, p. 27).

Israel sebagai negara demokratis yang ada di Timur Tengah dan dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Yahudi menjadikan keberadaan etnis minoritas Arab Israel sering mendapatkan perhatian dan perlakuan berbeda oleh pemerintah Israel terutama di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu, seolah-olah keberadaan penduduk Israel minoritas tersebut dengan etnis Arab adalah ancaman bagi keamanan nasional negara Israel menurut Benjamin Netanyahu. Pada masa kampanye pemilihan umum legislatif Knesset April 2019, Benjamin Netanyahu melakukan gerakan kampanye yang mengarah kepada kelompok etnis minoritas Arab Israel dan terkesan menyudutkan etnis minoritas tersebut, dengan menuliskan dalam akun Instagramnya “*Israel is the nation state of the Jewish people – and only it*”, tentunya pernyataan tersebut terkesan sangat menyudutkan kelompok tertentu dalam masyarakat Israel, tindakan tersebut dilakukan oleh Netanyahu untuk mengharapkan dan meraup suara penuh, serta dukungan dari politikus dan masyarakat golongan *far-right* di Israel (Caroline Alexander, Amy Teibel, 2019).

Bahkan Rueven Rivlin sebagai presiden Israel menepis pernyataan yang dilontarkan oleh Benjamin Netanyahu pada masa kampanye pemilu Israel 2019 yang menyatakan bahwa “*Israel is the nation state of the jewsiah people*” yang di mana pernyataan tersebut diarahkan kepada kelompok minoritas Arab Israel. Rueven Rivlin sendiri sebagai Presiden Israel menyatakan bahwa tidak ada masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas kedua di Israel, dan semua warga memiliki hak yang sama dalam urusan politik dalam pemilu di Israel terutama pada tahun 2019. Pernyataan yang dilontarkan oleh Netanyahu tersebut berlandaskan dari Undang-Undang “*Nation State*” yang sangat kontroversial, yang telah

disahkan pada tahun 2018 di mana dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri di negara Israel (Holmes, 2019)

Knesset pada 19 July 2018 mengesahkan Undang-Undang kontroversial, yang mengkhususkan dan karakterisasi Israel sebagai negara Yahudi, yang menyatakan orang Yahudi berhak menentukan nasibnya sendiri di Israel, dengan menyatakan Israel sebagai “*the national home of the jewish people*” peraturan yang menjadi peraturan dasar yang menyamai konstitusi (Raoul Wootliff, 2018). Meskipun Netanyahu menyatakan bahwa Israel adalah “*nation state of Jewish people*,” dan tetap menghargai dan menghormati hak-hak dari seluruh warga negaranya, namun peraturan tersebut dalam jangka panjang dapat beresiko mengalami etnis Arab Israel yang telah lama eksistensinya dalam masyarakat selalu merasa terdiskriminasi sebagai kelompok minoritas di Israel.

Sebelas poin dalam peraturan baru tersebut di antaranya adalah meletakkan status Jerussalem di bawah hukum Israel, yang di mana Jerussalem adalah kota yang di dambakan oleh masyarakat Palestina sebagai masa depan dari negara Palestina, dan menempatkan Ibrani sebagai bahasa nasional “*state language*” yang menjadi prioritas di atas bahasa Arab yang telah menjadi bahasa resmi negara Israel sebelumnya bersamaan dengan bahasa Ibrani, dan juga salah satu poin Undang-Undang tersebut adalah menekankan pentingnya pengembangan pemukiman Yahudi sebagai nilai nasional Israel (BBC, 2018)

Negara Israel tidak memiliki konstitusi yang tertulis, berbagai upaya untuk menyusun dokumen resmi sebagai konstitusi negara sejak 1948 telah gagal, dan

sebaliknya Israel telah mengembangkan sistem hukum dan hak dasar (*basic law*) yang memiliki status semi-konstitusional. Bahkan semenjak berdirinya negara Israel pada tahun 1948 tidak ada satu pun perjanjian yang menyatakan dengan jelas, spesifik apa arti “*Jewish*” dalam negara Yahudi (*Jewish State*) harus bertindak terhadap etnis Yahudi dalam negaranya dan bagaimana menghubungkan ke-Yahudian Israel dengan nilai-nilai dan karakter negara demokratis. Undang-undang ke-14 yang baru diadopsi berjudul, “*Basic Law: Israel – The Nation State of the Jewish People*” mengklaim mengkodifikasi nilai-nilai negara Yahudi. Ini menyatakan dengan status konstitusional bahwa Israel adalah negara Yahudi (Lintl & Wolfrum, 2018).

Undang-Undang tersebut telah lama dibahas sejak tahun 2011 dan telah ada beberapa draft yang telah di diskusikan sebelumnya dalam parlemen Israel, Knesset. Banyak dukungan dari kalangan partai Zionis untuk pentingnya mewujudkan karakter *Jewish nation-state* dalam Undang-Undang dasar Israel. Motivasi untuk mewujudkan hal tersebut terdiri dari beberapa alasan, di antaranya yaitu stagnansi proses perdamaian antara Israel dan Palestina dan bagi mayoritas Yahudi Israel, tujuan utama dari proses tersebut bukan lagi perjanjian perdamaian, tetapi menetapkan Israel sebagai Negara Yahudi. Kedua yaitu menolak tuntutan pasca-Zionis dan minoritas Arab di Israel yang ingin mendefinisikan Israel sebagai negara netral daripada negara Yahudi. Ketiga, undang-undang negara-bangsa berfungsi sebagai pernyataan proaktif terhadap upaya delegitimasi Israel, khususnya oleh gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang mengkampanyekan sanksi ekonomi, politik dan budaya secara internasional terhadap Israel. Bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, undang-undang

tersebut membawa Israel ke tujuan historisnya untuk memenuhi prinsip Zionisme Israel. Beberapa Anggota Arab Knesset, di sisi lain merobek salinan Undang-Undang tersebut saat diadopsi dan berulang kali meneriakkan ujaran kekesalan seperti "*apartheid*" kepada para pendukungnya (Lintl & Wolfrum, 2018).

Peraturan baru tersebut menjadi penting karena itu adalah gerakan simbolis yang bermakna besar, yang membuat etnis minoritas Arab Israel merasa adanya bukti kuat dari pemerintah Israel untuk mengurangi status mereka sebagai warga negara Israel. Etnis minoritas Arab di Israel seringkali merasa diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua dan mereka banyak mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi terutama dalam beberapa bidang pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan properti (BBC, 2018)

Pernyataan yang dilontarkan oleh Netanyahu tersebut dalam akun Instagramnya menjadi pemicu konflik di sosial media terutama dalam kalangan masyarakat Israel, yang menentang segala bentuk narasi yang menjelekkkan suatu kelompok masyarakat, bukan hanya Ruvlin sebagai Presiden Israel, Aktris Israel Rotem Sela dan Gal Gadot yang dikenal sebagai aktris Hollywood juga turut berkomentar atas narasi yang disampaikan oleh Netanyahu, dengan menuliskan dalam akun Instagram pribadinya "*When the hell will someone in this government tell the public that Israel is a country of all its citizens*", Gal Gadot juga merespon dengan menuliskan dalam akun Instagramnya "Ini bukan masalah kanan atau kiri, Yahudi atau Arab, religius atau sekuler. Ini masalah dialog untuk perdamaian, kesetaraan, dan toleransi satu sama lain. Tanggung jawab kita adalah menanamkan harapan dan cahaya untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita." Yang

diucapkan sebagai bentuk kekesalannya atas tindakan yang diambil oleh Netanyahu dalam masa kampanye pemilu Israel April tahun 2019 (Ynet, 2018)

Pernyataan yang menimbulkan perdebatan dan kritik di kalangan masyarakat Israel tersebut diduga sengaja dilakukan, dengan bahasa-bahasa yang provokatif yang diperhitungkan dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, berharap hal tersebut dapat membantu partai Likud dalam memperoleh suara pada pemilihan umum dari kalangan masyarakat pendukung partai sayap kanan (*right wing party*) seperti Likud. Pernyataan-pernyataan yang memburukkan (*demonizing*) suatu kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Netanyahu terhadap etnis Arab Israel, yang merupakan hampir 20% dari warga negara Israel adalah etnis Arab yang seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tuduhan-tuduhan dan perlakuan yang tidak adil. Bahkan Menteri Kebudayaan Israel, Miri Regev wawancaranya di sebuah acara langsung di stasiun televisi nasional Israel menyampaikan bahaya yang tak tertandingi bila etnis Arab Israel urut andil dan berpartisipasi sebagai pemilih dan bergabung berkoalisi membentuk pemerintahan di Israel (Bill Chappell, 2019).

Netanyahu juga mengusulkan Undang-Undang yang memungkinkan pejabat partai politik untuk dapat membawa kamera mereka ke dalam tempat pemilihan bilik suara, kritikus mengatakan hal tersebut sebagai upaya untuk mengintimidasi penduduk Arab Israel agar tidak memberikan suara mereka, karena tentunya banyak dari mereka sebagai minoritas tidak ingin preferensi politiknya untuk diketahui. Dalam pemilu sebelumnya April 2019 partai Likud Benjamin Netanyahu dikecam karena menyelundupkan kamera ke pusat pemungutan suara penduduk Arab Israel. Media Israel melaporkan bahwa Likud mengirim 1.200

pengamat dalam tempat pemilihan kependudukan Arab. Harian Israel Haaretz menerbitkan video yang memperlihatkan para aktivis yang tertangkap kamera oleh polisi, dengan salah satunya mengaku bahwa ia diutus oleh partai Likud (Reuters, 2019).

Anti Defamation League yang merupakan NGO's yang bergerak dalam bidang advokasi negara Yahudi demokratis Israel, dan mengedukasi masyarakat internasional tentang masalah keamanan, diplomatik dan kemasyarakatan yang dihadapi Israel juga melayangkan kritiknya terhadap pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas retorika dalam kampanyenya yang menuduh dan memburuk-burukkan warga beretnis Arab Israel. Carole Nuriel sebagai direktur ADL Israel menyampaikan bahwa peran partai Arab dalam Knesset semakin meningkat dan terus berkembang seiring dengan situasi kampanye seperti tahun 2019 yang cenderung menggunakan etnis sebagai alat dalam kampanye politik, contohnya dengan beberapa ketua partai politik dan politikus yang bersumpah untuk tidak mengikutsertakan orang-orang Arab Israel dalam membentuk Pemerintahan ke depannya. Retorika anti-Arab Israel yang dilontarkan Netanyahu dalam kampanye politiknya dapat menjadi masalah besar dan jika cara kampanye yang seperti itu terus dilakukan maka akan membahayakan dan merusak nilai-nilai demokrasi yang ada di Israel. Representasi dari Arab Israel dalam parlemen, Knesset adalah bukti dan kebanggaan tersendiri bagi Israel sebagai negara demokratis, meski konflik tak berujung dengan negara Arab tetangga, namun etnis Arab dalam komunitas masyarakat Israel tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang sama dengan yang lainnya (Michael Bachner, 2019)

Popularitas suara Benjamin Netanyahu dalam menghadapi pemilihan umum pada 9 April 2019 menurun drastis disebabkan dakwaan korupsi yang tertunda, dan Benjamin Netanyahu atau biasa disebut “Bibi” menggambarkan Ahmad Tibi, seorang politikus Israel dan ketua partai Ta’al, partai Arab di Israel kepada publik dalam kampanyenya sebagai ancaman atas keamanan nasional negara Israel dan mengkritik, mempertanyakan kesetiaan warga negara Israel etnis Arab. Dengan caranya sendiri dalam beretorika, Netanyahu menggunakan slogan “*Bibi or Tibi,*” Netanyahu menggambarkan penantangannya sebagai golongan kiri lemah yang berkonspirasi dengan Arab Israel dan media yang bermusuhan untuk menggulingkannya. Menyoroti Tibi sebagai politikus veteran di Israel dan dikenal karena kritik kerasnya terhadap kebijakan pemerintah terhadap warga negara Arab di Israel dan terhadap warga Palestina yang hidup di bawah kendali Israel di wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967, Ahmad Tibi mengkhawatirkan upaya *demonizing* Netanyahu terhadap warga Arab Israel sebagai minoritas. Mengutip pernyataan Tibi, “*He is delegitimizing the Arab parties, the Arab lawmakers and the Arab public in general,*” he said. “*He’s trying to transmit that it is either me, the supposed patriotic Jewish leader, or the Arabs will take over the country and decide who will be the prime minister. And he portrays this as a nightmare.*” Menurut Ahmad Tibi, ada kemungkinan bahwa Netanyahu akan membawa Israel menjadi negara “*binational state*” dan kemudian akan menjadikan Israel negara *apartheid* di mana hanya orang-orang Yahudi yang dapat memberikan suaranya atau negara demokratis di mana setiap warga memiliki hak suara yang sama dalam politik Israel (Aron Heller, 2019)

Namun kampanye yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menghadapi pemilihan umum pada 9 April 2019 tidak membuahkan hasil yang baik baginya dengan hasil sebagai berikut.

Table 2. Hasil perolehan suara Pemilu Knesset 9 April 2019

Name of list	Number of valid votes	% of total votes	Number of seats
Likud Chaired by Benjamin Netanyahu for Prime Minister	1,140,370	26.46	35
Blue and White	1,125,881	26.13	35
Shas	258,275	5.99	8
United Torah Judaism	249,049	5.78	8
Hadash-Ta'al	193,442	4.49	6
Israeli Labor Party	190,87	4.43	6
Yisrael Beiteinu	173,004	4.01	5
United Right	159,468	3.70	5
Meretz	156,473	3.63	4
Kulanu Chaired by Moshe Kahlon	152,756	3.54	4
Ra'am-Balad	143,666	3.33	4

(*Knesset Elections Results - Twentieth-First Knesset*, n.d.)

Tidak ada yang memenangkan pemilu tersebut, karena tidak ada koalisi yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang untuk dapat membentuk Pemerintahan Israel yang baru. Pemerintah Israel tidak terdiri dari partai individu, tetapi dari koalisi yang jarang terdiri kurang dari empat partai. Pemenang pemilu tidak harus dari partai terbesar, tetapi blok terbesar. Contohnya ketika partai sentris Kadima di bawah Tzipi Livni memenangkan 28 kursi dalam pemilu 2009, Netanyahu dengan partai Likud hanya memenangkan 27 kursi namun Ia dapat menjadi perdana menteri, karena partainya dapat mengandalkan dukungan dari cukup banyak partai untuk memberinya mayoritas suara di Knesset. Jika 61 atau lebih dari 120 anggota parlemen Knesset merekomendasikan satu calon, Presiden Rivlin diharapkan menugaskan calon itu untuk membangun koalisi. Tetapi jika tidak, tidak ada pedoman yang jelas tentang bagaimana presiden harus memutuskan siapa yang akan dipercaya untuk membentuk suatu pemerintahan. Ruvan Rivlin telah memberikan Benjamin Netanyahu tanggung jawab untuk membentuk

pemerintahan dengan diberikan batas waktu 28 hari, dan juga perpanjangan selama 14 hari namun Netanyahu tetap gagal membentuk koalisi yang cukup untuk meraih di atas 61 suara dalam parlemen, Knesset (Raoul Wootliff, 2019).

2.3. *Speech Act* Perdana Menteri Netanyahu terhadap etnis Arab-Israel dalam kampanye Pemilu September 2019

Tidak jauh berbeda strategi yang dilancarkan oleh Netanyahu dalam kampanyenya untuk menghadapi pemilihan umum kedua pada tanggal 17 September 2019. Bentuk-bentuk retorika yang sama dengan cara “*demonizing*” etnis Arab Israel untuk meraih suara mayoritas masih terus dilakukannya meski upaya tersebut pada pemilu sebelumnya telah gagal untuk memenangkannya dapat kembali menduduki posisi jabatan Perdana Menteri. Bahkan Pada hari terakhir sebelum dimulainya pemilihan umum kedua pada tanggal 17 September 2019, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah meningkatkan retorikanya terhadap orang Arab Israel, "Orang-orang Arab ingin memusnahkan kita semua - wanita, anak-anak dan pria," dari halaman Facebook-nya Netanyahu menuliskan, “*So I am asking you to be the prime minister’s envoy and bring three friends or family members next Tuesday and make sure they’re voting Likud*” untuk mengajak pendukungnya menggunakan hak suaranya dan menyelamatkan Israel dari orang-orang Arab Israel (Noga Tarnopolsky, 2019).

Tindakan yang sama yang pernah dilakukan oleh Benjamin Netanyahu dalam kampanyenya, dengan strategi untuk meraup suara penuh pendukungnya pada akhir waktu sebelum hari pemilihan yang pernah dilakukannya pada pemilihan umum sebelumnya di tahun 2015, dengan mengunggah sebuah video menjelaskan politikus sayap kanan di Israel berada dalam bahaya karena banyak

warga Arab yang bergerak menuju bilik pemilihan suara yang dipengaruhi kelompok sayap kiri (Aron Heller, 2019).

Bahkan Facebook telah menanggukkan *chatbot* di halaman resmi Benjamin Netanyahu karena telah melanggar kebijakan Facebook tentang ujaran kebencian dengan mengirim pesan yang memperingatkan orang-orang Arab dengan kalimat ujaran ancaman dan kebencian "*the Arabs want to destroy is all*" (Oliver Holmes, 2019). Dalam kampanye politik putaran kedua tersebut Benjamin Netanyahu semakin agresif dengan janji-janji politiknya jika terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel. Benjamin Netanyahu, yang berjuang untuk status politiknya sebelum pemilihan pada 17 September 2019, mengatakan dia akan secara permanen merebut sepertiga dari Tepi Barat, sebuah langkah yang selama beberapa dekade telah dianggap sebagai bentuk skenario akhir dari aspirasi negara Palestina. Para pemimpin negara Arab telah mengecam rencana Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sebagian besar wilayah Palestina jika dia terpilih kembali karena janji-janji politiknya yang membahayakan dan dianggap dapat merusak semua peluang untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Ayman Odeh, pemimpin aliansi partai-partai Arab di Israel, menyebut pernyataan Benjamin Netanyahu bukan hanya suatu gerakan kampanye dalam pemilu tetapi janji-janji politik tersebut adalah visi negara apartheid (Michael Safi, 2019).

Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Benjamin Netanyahu dalam kampanye politik putaran kedua merupakan provokasi yang sangat kuat, dan para penduduk Arab yang memiliki hak suara tidak menyukai hal tersebut, memutuskan untuk melakukan sesuatu atas tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu menurut Thabet Abu Rass, wakil direktur Abraham Initiatives sebuah

organisasi Arab-Yahudi yang bekerja untuk mewujudkan kesetaraan hak di Israel. Menurut data dari Arik Rudnitzky, Institut Demokrasi Israel non-partisan (IDI), jumlah pemilih Arab melonjak menjadi 59 persen dalam pemilihan putaran kedua September 2019, naik dari rekor terendah 49 persen pada bulan April 2019 sebelumnya. Narasi ujaran kebencian dan ketakutan Netanyahu, menyalahkan orang Arab karena ingin mencuri pemilu, menurut Abu Rass adalah faktor pertama dan terpenting di balik partisipasi yang lebih tinggi di antara pemilih Arab pada pemilu putaran kedua tersebut (Yardena Schwartz, 2019)

Benjamin Netanyahu berbicara kepada para pendukungnya di markas partai pada hari pemilihan umum diadakan, dengan mengatakan, “dalam beberapa hari mendatang, kami akan melakukan negosiasi untuk membentuk pemerintahan Zionis yang kuat dan untuk mencegah pemerintah anti-Zionis yang berbahaya. anti-Zionis yang disebutkannya diarahkan pada partai-partai Arab Israel, dengan hasil sementara menunjukkan bahwa mereka koalisi partai Arab Israel bisa menjadi kekuatan terbesar ketiga di parlemen. Benjamin Netanyahu tidak hanya berjuang untuk kehidupan politiknya dan mempertahankan posisi sebagai Perdana Menteri tetapi juga kebebasannya. Sidang untuk tiga kasus korupsi terhadapnya hanya berjarak dalam waktu beberapa minggu ke depan, dan mayoritas di parlemen dengan 120 kursi diharapkan dapat membantu memberinya kekebalan dari penuntutan jika kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Israel (Kate Lyons, 2019).

Dengan strategi kampanye yang telah dilancarkan oleh Benjamin Netanyahu dengan harapan dapat membantunya kembali menduduki posisi jabatan Perdana Menteri, namun dengan hasil suara yang tercatat pada pemilihan umum

putaran kedua pada September 2019 tidak berakhir baik bagi Benjamin Netanyahu dan partai Likud, karena mereka mendapatkan suara penuh dengan hasil suara sebagai berikut.

Table 3. Hasil perolehan suara Pemilu Knesset

Name of list	Number of valid votes	% of total votes	Number of seats
Blue and White	1,151,214	25.95	33
Likud	1,113,617	25.10	32
Joint List (Hadash, Ra'am, Ta'al, Balad)	470,211	10.60	13
Shas	330,199	7.44	9
Yisrael Beiteinu	310,154	6.99	8
United Torah Judaism	268,775	6.06	7
Yemina	260,655	5.87	7
Labor-Gesher	212,782	4.80	6
Democratic Union	192,495	4.34	5

(*Knesset Elections Results - Twentieth Second Knesset*, n.d.)

Dalam hasil pemilihan umum putaran kedua tersebut, tidak satu pun dari partai-partai di atas yang memiliki cukup suara untuk dapat membentuk pemerintahan sendiri. Yang berarti mereka harus membuat suatu kesepakatan pembagian kekuasaan satu sama lain dan membentuk apa yang disebut pemerintah "persatuan nasional" atau, menggabungkan beberapa jenis koalisi dari partai-partai kecil yang membentuk Knesset. Pemilihan Knesset ke-22 September 2019 berakhir tanpa hasil yang jelas. Dalam pertarungan antara dua partai besar, Blue and White Party memenangkan 33 suara, dibandingkan dengan Likud, yang hanya memenangkan 32 suara. Namun tak satu pun dari calon perdana menteri, Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu, memiliki mayoritas 61 anggota Knesset, hasil *deadlocked* tersebut kembali menghambat proses untuk Benjamin Netanyahu kembali menduduki kursi Perdana Menteri Israel (Zack Beauchamp, 2019).

Atas respon dari speech act yang dilakukan oleh Netanyahu sebagai Perdana Menteri, penulis memaparkan beberapa respon dari kelompok pendukung partai Likud dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam sebuah wawancara pada suatu acara kampanye, Ketika ditanyakan mengapa orang tersebut memilih dan mendukung Netanyahu? Jawaban yang penulis temukan adalah bahwa Netanyahu adalah orang yang melindungi Israel dari perpecahan, dan pelemahan kedaulatan Israel dari berbagai ancaman, dan upaya demiliterisasi Israel. Beberapa orang lainnya menjawab bahwa Netanyahu adalah harapan mereka untuk Israel yang lebih aman, dari berbagai ancaman perang dan ancaman terorisme. Jawaban lainnya juga adalah orang-orang Yahudi tidak boleh menyerahkan negara Israel kepada orang-orang Arab, dengan mengatakan “they are all want to throw us to the sea”(Haretz, 2017). Dengan respon dari kelompok pendukung Netanyahu tersebut terlihat saling berkaitannya antara speech act yang disampaikan oleh Netanyahu secara rutin, dengan timbal-balik yang diberikan oleh audiens, dalam kasus ini yaitu kelompok mayoritas Yahudi Israel, pendukung Benjamin Netanyahu selama Netanyahu menjabat sebagai perdana Menteri, dan semakin gencar lagi saat semakin dekatnya waktu Pemilu Israel 2019.

Retorika yang selalu disampaikan oleh Benjamin Netanyahu selama dua putaran kampanye pemilihan umum Israel pada April 2019 dan September 2019, dalam proses sekuritisasi disebut sebagai *speech act*, dengan mengubah suatu isu menjadi masalah keamanan khusus yang bukan disebabkan atas dasar ancaman nyata namun sengaja di konstruk dan disajikan sebagai suatu masalah ancaman atas keamanan. *Speech act* biasanya juga berbicara tentang keberlangsungan hidup, masa depan berbangsa dan bernegara yang akhirnya suatu tindakan harus dilakukan

dengan alasan “*if the problem is not handled now it will be too late, and we will not exist to remed your failure*” (Buzan, 1998, p. 26)

2.4. Etnis Arab-Israel sebagai ancaman terhadap *political, societal sector* Israel menurut Netanyahu

Ancaman eksistensial dalam sektor politik secara tradisional di definisikan sebagai ancaman terhadap landasan suatu negara, baik konstitusi, prinsip nilai dasar, maupun kedaulatan dan juga ideologi. Ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara dapat berupa bentuk apa pun yang berkaitan dengan legitimasi dan otoritas suatu pemerintahan negara. Ancaman terhadap kestabilan baik dalam bidang politik, sosial maupun sistem pemerintahan dan keamanan sehingga suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan suatu pemerintahan politik negara (Buzan, 1998, p. 22).

Israel sering disebut sebagai satu-satunya negara yang menganut sistem demokrasi di Timur Tengah. Ini tidak sepenuhnya benar. Indeks Demokrasi Global dari The Economist 2019, memberikan peringkat pada 167 negara, berdasarkan lima kriteria demokrasi, dengan mencantumkan Israel sebagai negara demokrasi yang cacat. Israel mendapat skor bagus dalam proses pemilihan atau pluralisme dan partisipasi politik, tetapi ditandai dengan fungsi pemerintah, budaya politik, dan, khususnya, kebebasan sipil, di mana, skor Israel hanya 5,88 dari skala skor 10. Kegagalan ini membawa Israel ke urutan ke-28 dalam daftar, tetapi itu masih jauh lebih tinggi daripada tetangganya. (Ian Parmeter, 2020).

Sekitar 21% dari lebih dari sembilan juta warga Israel adalah etnis Arab dan mayoritas orang Arab Israel sekitar 83% dari mereka adalah Muslim. Orang Arab

di Israel memiliki hak suara yang sama dalam negara demokratis Israel bahwa faktanya, Israel adalah salah satu negara di Timur Tengah di mana wanita Arab dapat memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan politik menggunakan haknya, orang Arab Israel juga memegang berbagai jabatan politik dalam pemerintahan Israel. Meski tidak ada peraturan pemisahan secara institusional, orang Yahudi dan Arab telah memilih untuk hidup terpisah di semua kota kecuali di beberapa kota. Pemukiman penduduk Arab Israel secara historis menerima lebih sedikit dana daripada daerah-daerah Yahudi dan hal tersebut telah memengaruhi kualitas sekolah, infrastruktur, dan layanan sosial Arab. Orang Arab juga kurang terwakili dalam pendidikan tinggi dan sebagian besar industri (Mitchell Bard, 2021).

Perkembangan minoritas Arab di Israel sebagai minoritas nasional dapat dilihat dengan membagi tahapan perkembangan menjadi empat fase sejarah yaitu, 1948–67 (Akomodasi), 1967–93 (*Palestinization*), 1993-2000 (Lokalisasi), dan tahun 2000 sampai dengan sekarang adalah fase Rekonstruksi, menurut Elie Rekhess. Semestinya dari tahun 2000 sampai dengan sekarang proses rekonstruksi etnis minoritas Arab-Israel berjalan sesuai dengan nilai-nilai negara demokratis Israel yang mengutamakan kesetaraan hak antar seluruh warga negaranya (Peled, 1975, p. 188).

Ancaman eksistensial dalam teori sekuritisasi adalah ancaman yang sengaja di konstruk oleh aktor sekuritisasi, dengan suatu tujuan tertentu terhadap objek sekuritisasi untuk mempengaruhi *audiens*, di mana dalam rumusan masalah ini aktor sekuritisasi tersebut adalah Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel, yang memberikan keamanan, untuk para penduduk mayoritas Israel *right*

wing, dari ancaman-ancaman yang dalam kampanye Benjamin Netanyahu adalah etnis minoritas Arab Israel (Eroukhmanoff, 2018, p. 2).

Keberadaan etnis Arab Israel sebagai minoritas di Israel tidak bisa terelakkan sebagai bagian dari warga negara Israel semenjak terbentuknya negara Israel pada tahun 1948, namun sepanjang tahun 2019 tidak ditemukan satu gerakan yang dilakukan oleh kelompok minoritas Arab Israel terhadap negara Israel, yang dapat mengancam kedaulatan negara Israel, namun Benjamin Netanyahu berpandangan lain dengan menggunakan narasi-narasi yang memburukkan (*demonizing*) para penduduk Israel etnis minoritas Arab Israel yang dapat mengancam kedaulatan negara Israel dan ancaman-ancaman lainnya dalam narasi yang dibangunnya selama masa kampanye pemilihan umum politik tahun 2019.

Benjamin Netanyahu menganggap bahwa etnis Arab Israel yang di mana jumlah mereka adalah 20% dari keseluruhan penduduk Israel sebagai ancaman dalam sektor politik dan juga sosial, dalam kampanye-kampanye politiknya Netanyahu selalu menganggap dan mendeskripsikan mereka, penduduk Arab Israel sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara Israel dengan berbagai alasan, seperti keberadaan warga Arab Israel mengancam identitas Israel sebagai negara Yahudi, dan beranggapan bahwa orang-orang Arab adalah ancaman kepada para pendukungnya selama masa kampanye dengan menyatakan "*the Arabs want to destroy us all*" (Oliver Holmes, 2019). Netanyahu juga dengan caranya untuk mengajak para pendukungnya memilih menggunakan hak suara dalam pemilihan umum agar dirinya tetap bisa kembali menjabat sebagai Perdana Menteri, dan agar

penduduk Arab Israel tidak menguasai negara Israel jika dirinya kembali terpilih sebagai Perdana Menteri.

Dalam ancaman sektor sosial, Buzan mendefinisikan *referential object* sebagai suatu identitas yang terdapat dalam suatu negara, seperti budaya, bahasa, dan agama. Karena negara tentunya tidak terlepas dengan suatu identitas yang dimilikinya dan hal tersebut berkaitan dengan cita-cita dan visi dalam bernegara. Dengan disahkannya Undang-Undang *Jewish Nation State* pada tahun 2018, mengkokohkan dan semakin memperkuat legitimasi Israel sebagai negara Yahudi dengan sistem demokrasi dengan masyarakatnya yang terdiri dari berbagai macam etnis dan suku, agama yang berbeda-beda, di mana hal tersebut seharusnya dijaga dengan baik dengan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati (Buzan, 1998, p. 23).

Netanyahu seorang politikus *right wing* di Israel dengan jelas lebih condong terhadap penduduk mayoritas Yahudi, dan mendukung penuh konsep negara Yahudi Israel salah satu bentuknya adalah dengan disahkannya Undang-Undang *Jewish Nation State*, Netanyahu juga menjunjung tinggi identitas Israel sebagai negara Yahudi. Dengan memberikan berbagai keistimewaan terhadap etnis Yahudi di Israel hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*). Beranggapan bahwa segala bentuk pengaruh yang dapat merubah identitas Israel sebagai negara Yahudi, sebagai ancaman. Dalam kasus pada tulisan ini ancaman yang dimaksud adalah etnis Arab Israel.

Yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu menghambat pengimplementasian nilai-nilai demokrasi di Israel. Netanyahu mendefinisikan

demokrasi sebagai sistem yang didasarkan pada keinginan mayoritas dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling memeriksa dan menyeimbangkan, dalam pernyataan tersebut tidak disebutkan fakta bahwa demokrasi liberal juga merupakan suatu sistem yang melindungi hak-hak minoritas dan hak asasi manusia, sipil setiap orang sebagai suatu warga negara Israel, dan mengutamakan supremasi hukum, yang berlaku sama untuk semua orang secara adil (Susan Rolef, 2020).



BAB III

***Emergency Action* Pemerintah Israel era Netanyahu terhadap warga Arab Israel**

Ancaman eksistensial merupakan suatu ancaman yang di narasikan oleh aktor sekuritisasi dalam memandang suatu permasalahan atau isu tertentu, proses retorika yang biasa disebut sebagai *speech act*, biasanya retorika dalam narasi yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi berkaitan dengan keberlangsungan hidup, yang pada akhirnya dibutuhkan suatu tindakan prioritas karena jika tidak ditangani segera dianggap suatu isu tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup dan keamanan. Dalam praktik ini, Buzan, Waever dan Wilde menyatakan, siapa yang dapat melakukan dan berbicara tentang keamanan dengan kekuasaannya (*speech act*) terutama tentang isu apa yang berhasil diangkat, dalam kondisi seperti apa, dan apa akibatnya, namun sekuritisasi tidak hanya semata-mata praktik *speech act* terhadap objek referensi dan *audiens* tertentu sesuai kepentingan aktor sekuritisasi, yang terpenting adalah pembentukan suatu ancaman eksistensial terhadap suatu isu yang diyakini suatu *audiens* yang membutuhkan *emergency action* segera atas isu yang telah di konstruk oleh aktor sekuritisasi tersebut. Namun dalam beberapa kasus sekuritisasi juga ada yang telah berhasil terlembagakan (*institutionalized*) sehingga tidak ada diperlukan lagi drama konstan karena secara implisit suatu isu telah menjadi masalah keamanan yang pasti (Buzan, 1998, pp. 24-27).

3.1. Pengesahan *Basic Law Jewish Nation State* sebagai *Emergency Action* pemerintah Israel terhadap warga Arab Israel masa kampanye pemilihan umum 2019

Sepanjang sejarah berdirinya negara Israel, Israel selalu berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan negara Arab tetangga, Palestina dan warga Arab yang tinggal di Israel menjadi bagian dari masyarakat negara Israel. Etnis minoritas sering kali mendapatkan perhatian terutama pada saat krisis yang buruk. Hal tersebut tidak akan terjadi kecuali Israel menerapkan kebijakan inklusif terhadap warga Arab Israel dan memiliki visi jangka panjang terhadap etnis Arab Israel sebagai bagian dari masyarakat Israel. Etnis Arab yang merupakan 20% dari bagian masyarakat Israel sebagian besar terputus dari arus utama politik, ekonomi dan budaya, meskipun beberapa orang tetap mendapatkan hak politiknya tetap sebagian besar masih mendapatkan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak. Hal-hal tersebut tentunya mempengaruhi nilai fundamental demokrasi sosial di Israel, seperti sumber daya, hak-hak sosial, dan perwakilan dalam hal politik bernegara (ICS, 2014).

Israel tidak pernah sepenuhnya menjadi negara demokrasi liberal dengan memperlakukan semua warga negaranya dengan setara, menjamin hak atas semua warga yang terdiri dari berbagai etnis dan agama dalam negara Israel. Bahkan para ahli menyebutkan Israel sebagai negara demokrasi etnis, yang melayani orang Yahudi terlebih dahulu, dan meminggirkan yang lainnya. Sementara kualitas standar kehidupan warga Arab Israel terus meningkat. Israel tidak bisa memenuhi janjinya yang tertera dalam deklarasi kemerdekaan (*Declaration of Independence*) dengan kalimat yang tertera “*foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants,*” dan “*ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex.*” Di mana tujuan tersebut

hanya dapat dipenuhi dengan memperjuangkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi liberal dalam pemerintahan Israel (Dov Woxman, 2018).

Sebagian besar warga Arab di Israel yang menjadi bagian dari masyarakat Israel percaya bahwa mereka tidak akan pernah mencapai kesetaraan penuh dengan orang warga Yahudi Israel selama Israel mendefinisikan dirinya sebagai negara Yahudi. Hal tersebut membuat mereka warga Arab Israel sering melakukan advokasi dan menyuarakan agar Israel mendefinisikan kembali dirinya sebagai "negara untuk semua warganya." Serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi liberal di Israel. Namun Undang-Undang yang baru ditetapkan pada tahun 2018 *Basic Law; The Jewish Nation State* mencegah hal tersebut dapat terjadi tujuan untuk mewujudkan demokrasi liberal di Israel (Dov Woxman, 2018).

Avi Dichter, anggota dari partai Likud yang pertama kali mengusulkan Rancangan Undang-Undang *Jewish Nation State* dan merupakan salah satu sponsor utamanya, Dichter berkata, "Kami menetapkan Undang-Undang penting ini untuk mencegah pemikiran berbahaya sekecil apa pun, terutama upaya, untuk mengubah Israel menjadi negara untuk semua warganya (*country of all its citizens*)" (Ben White, 2018). Dalam pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Likud, sebagai partai sayap kanan Israel dengan menetapkan Undang-Undang *Jewish National State* sebagai tindakan *emergency action* atas dasar pandangan bahwa entitas Arab Israel sebagai bagian dari kelompok masyarakat Israel yang memiliki tujuan berbeda atas negara Israel, tidak seperti kebanyakan mayoritas warga negara Yahudi lainnya sebagai ancaman.

Kelompok sayap kanan seperti Likud di Israel menganggap Arab Israel yang menuntut dan sering menyuarakan agar ditegakannya kesetaraan hak, keadilan serta perwujudan nilai-nilai demokrasi liberal lainnya di Israel, dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai suatu ancaman akan identitas Israel sebagai negara dengan karakteristik Yahudi dan negara yang bermayoritaskan etnis Yahudi di Israel.

Mengadopsi Undang-Undang *the nation state law* adalah upaya untuk membawa sistem politik Israel ke arah majoritarianisme, di mana hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak masyarakat minoritas tergerus, yang dilindungi dalam konstitusi Israel dan pembagian kekuasaan dibatasi oleh mayoritas etnis Yahudi yang tentunya akan menduduki dan menguasai parlemen Knesset. Di mana politik *illiberal* dan nasionalisme etnis di praktikan oleh mayoritas suatu kelompok masyarakat dalam negara.

Pada saat yang sama, Undang-Undang *the nation state* tidak hanya diadopsi dengan alasan ideologi Yahudi Israel, tetapi juga sebagai salah satu strategi dalam pemilihan umum. Perdana Menteri Netanyahu dalam hal ini mendapat manfaat dari meningkatnya polarisasi masyarakat Israel yang disebabkan oleh Undang-Undang *the nation state*. Netanyahu sebagai aktor sekritisasi menggambarkan lawan politiknya sendiri sebagai tidak patriotik, menyoroti perbedaan politik antara kelompok kanan dan kiri. Undang-Undang tersebut juga telah melemahkan oposisi dari partai Likud dengan menonjolkan perbedaan dan kritik antara Yahudi dan Arab Israel. Dalam kasus ini, menetapkan Undang-Undang *the nation state* juga merupakan langkah politik yang dirancang oleh Benjamin

Netanyahu sebagai bentuk adu domba antara kelompok mayoritas dan minoritas di Israel (Lintl & Wolfrum, 2018).

3.2. Kedaulatan Israel dan kependudukan atas Golan Height sebagai gerakan politik pada Pemilu 2019

Permasalahan warga Arab Israel tentunya tidak akan bisa lepas dari masalah hubungan konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mengalami kendala masalah politik setelah Netanyahu gagal mengumpulkan koalisi yang dapat membentuk pemerintahan Israel, berusaha mengalihkan perhatian publik dengan strategi khususnya yaitu politik teater. Dengan memperlihatkan peta Israel yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Israel dan telah diperbarui untuk memasukkan Dataran Tinggi Golan yang telah lama menjadi sengketa sebagai bagian dari wilayah negara Israel (AP, 2019).

Robert Malley, mantan penasihat untuk Timur Tengah masa kepresidenan Barack Obama, mengatakan “Keputusan Netanyahu sangat politis, waktunya untuk meningkatkan peluang pemilihan Netanyahu apa pun yang dilakukannya tidak akan mengubah kendali Israel atas Dataran Tinggi Golan, dengan mengabaikan hukum internasional dan langkah tersebut dibuat pada saat suara-suara di Israel yang menyerukan aneksasi di wilayah Tepi Barat dari kelompok mayoritas masyarakat Israel semakin keras". Lebih dari 700.000 penduduk telah tinggal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak perang pada tahun 1967. Di mana kedua wilayah tersebut diklaim oleh warga Palestina sebagai negara masa depan mereka kelak (Julian Borger, 2019).

Pemerintah Amerika Serikat masa kepemimpinan presiden Trump melakukan banyak hal untuk membantu pemerintah sayap kanan Israel pada masa Benjamin Netanyahu, dengan menghukum Palestina dan mengubur harapan solusi dua negara, memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem, mengakhiri pendanaan untuk badan pengungsi Palestina PBB, serta mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, dan yang terburuk adalah tidak lagi menganggap permukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki oleh Israel sebagai tindakan yang *Illegal* (The Guardian, 2019).

Beberapa analis dan reporter memperhatikan bahwa waktu pengumuman atas peresmian Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel tersebut dihitung secara politis untuk mendukung kampanye Netanyahu dalam pemilihan Israel pada 9 April 2019. Dengan menggunakan Donald Trump sebagai sosok yang populer di Israel, terutama setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan dalam kampanyenya menggunakan foto presiden Amerika di poster kampanye pemilihan umum putaran keduanya untuk memanfaatkan popularitas Trump dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari para pendukungnya (Dina Badie, 2019).

3.3. Skandal kasus korupsi Netanyahu dan pemilihan umum Israel 2019

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu didakwa atas tuduhan korupsi dan suap, dalam dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Israel Avichai Madelblit. Tuduhan serius tersebut berkaitan dengan tiga kasus pelanggaran masalah keuangan dan politik, dan membawa kemungkinan besar hukuman penjara

jika Netanyahu terbukti bersalah. Pemilihan umum Israel pada 9 April 2019 adalah ke empat kalinya bagi Netanyahu untuk kembali menjabat sebagai Perdana Menteri. Keputusan Avichai Jaksa Agung Israel dapat berdampak terhadap partai konservatif Israel Likud dengan semakin berkurangnya legitimasi atas Likud, dan mempersulit Likud dalam membangun koalisi setelah pemilihan umum Israel.(Alexia Underwood, 2019).

Dakwaan pertama yaitu terhadap kasus *teleco trade off*, kasus tersebut dianggap sebagai kasus yang paling merusak citra Netanyahu karena skandal tersebut melibatkan dua dari asisten Netanyahu yang bersaksi melawan Benjamin Netanyahu atas kecurigaan mempromosikan kebijakan yang bernilai ratusan juta dolar kepada perusahaan telekomunikasi Israel Bezeq, sebagai timbal balik situs berita Bezeq yaitu Walla diduga memberikan liputan berita yang menguntungkan Benjamin Netanyahu dan keluarganya. Kemudian kasus di mana polisi mendakwa Netanyahu karena menerima hampir \$300.000 hadiah dari tokoh Hollywood Arnon Milchan dan miliarder Australia James Packer, dakwaan tersebut berkaitan dengan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Kasus ketiga di mana Polisi merekomendasikan untuk mendakwa Benjamin Netanyahu dengan alasan menawarkan Undang-Undang penerbit surat kabar yang bertujuan untuk melemahkan saingan media surat kabar korannya Netanyahu dilaporkan meminta Arnon Mozes, penerbit harian Yediot Ahronot, untuk menerbitkan liputan positif terhadapnya dengan imbalan membantu melemahkan Israel Hayom rival surat kabar Yediot Ahronot (Aron Heller, 2019b).

Dakwaan atas tiga kasus suap, korupsi dan pelanggaran atas kepercayaan yang dihadapi oleh Benjamin Netanyahu pada masa Pemilihan Umum Israel

Periode 2019 diduga berdampak pada upaya dan strategi Benjamin Netanyahu dalam menghadapi Pemilihan Umum pada tahun 2019. Untuk mengamankan jabatan politiknya Benjamin Netanyahu berusaha keras untuk tetap menduduki jabatan Perdana Menteri dengan tujuan untuk mengamankan dirinya dari tuntutan atas dakwaan 3 kasus besar tersebut, dan mendapatkan imunitas penuh atas tuntutan terhadap Benjamin Netanyahu.

Emergency action sebagai tindakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi sebagai bentuk pencegahan terhadap suatu ancaman yang dibentuk dengan sengaja dan dengan alasan tertentu oleh aktor sekuritisasi, dalam kasus ini yaitu langkah-langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas respon dari suatu kelompok yang dianggapnya sebagai ancaman yaitu etnis minoritas warga etnis Arab di Israel.

Tindakan yang diambil atas dasar kepentingan darurat dari suatu kelompok yang perlu di lindungi yaitu mayoritas Yahudi Israel dari ancaman kelompok minoritas Arab yang dalam narasi politik Benjamin Netanyahu sering ia sebutkan sebagai suatu ancaman nyata atas keutuhan dan kedaulatan negara Yahudi Israel kedepannya dengan cara *demonizing* terhadap kelompok minoritas yang juga adalah warga negara Israel dan menetapkan suatu Undang-Undang baru, *Jewish Nation State*, di mana kelompok minoritas etnis Arab Israel sebagai warga negara Israel merasa semakin di diskriminasi oleh pemerintah Israel terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Dua dekade Benjamin Netanyahu menjadi salah satu orang yang memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan Israel dan sekarang setelah dua periode berturut-

turut menjadi Perdana Menteri dengan memenangkan Pemilihan Umum pada tahun 2009 dan 2015, dalam upaya untuk kembali menjabat yang ketiga kalinya Benjamin Netanyahu berusaha untuk tetap kembali menduduki posisi Perdana Menteri Israel dengan mengikuti Pemilihan Umum Israel pada tahun 2019.

Dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019 penulis dengan menggunakan teori sekuritisasi dari Barry Buzan mencoba untuk menganalisis langkah politik Benjamin Netanyahu terutama dalam upayanya untuk kembali menjabat sebagai Perdana Menteri pada Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tahun 2019. dengan *Emergency action* menjadi salah satu langkah politik yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menghadapi dan memenangkan kembali Pemilihan Umum Israel tahun 2019 seperti menetapkan Undang-Undang *Jewish Nation State*, mendeklarasikan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah dari kedaulatan negara Israel yang dilakukan pada masa-masa kampanye politik Pemilu Israel 2019 sebagai bagian dari upaya sekuritisasi terhadap kelompok minoritas Arab di Israel dan mendapatkan dukungan dari kelompok mayoritas sayap kanan Yahudi Israel.

3.4. *Breaking free of rules* sebagai tahap terakhir kesuksesan sekuritisasi menurut Buzan

Pelanggaran aturan dikenal dalam teori sekuritisasi sebagai suatu keadaan di mana aktor sekuritisasi memiliki wewenang untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya dalam mengatasi dan mencegah suatu masalah yang dianggap sebagai isu dalam masalah keamanan, di luar batas normal sebagai bagian dari proses dalam sekuritisasi. Sekuritisasi yang berhasil terdiri dari tiga tahapan

proses yaitu, *existential threats, emergency action, and effect interunit by breaking free of rules* (Buzan, 1998, p. 26).

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu dalam proses *breaking free of rules*, di mana pemerintah Israel mengabaikan beberapa peraturan tertentu yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan perhatian dari *audiens* tertentu yaitu kelompok pendukung politik sayap kanan Israel. Berkaitan dengan diloloskannya *Basic Law Jewish Nation State*, yang menjadi Undang-Undang kontroversial di Israel ditetapkan pada tahun 2018, dan berdampak panjang bahkan sampai pada tahun 2019 ketika berlangsungnya Pemilu Israel.

Undang-Undang *Basic Law* tersebut di anggap oleh kelompok minoritas Arab-Israel sebagai ancaman atas legitimasi mereka sebagai salah satu bagian dari warga negara Israel yang seharusnya memiliki hak, dan perlakuan yang sama dengan setiap individu dan kelompok lainnya. Penulis dengan menggunakan variabel *breaking free of rules*, di mana aktor sekuritisasi melanggar aturan-aturan tertentu di luar batas normal untuk bertindak atas suatu alasan dan kepentingan terhadap perlindungan atas keamanan. Dengan telah disahkannya *Basic Law Jewish Nation State* penulis menemukan beberapa aturan-aturan yang telah di langar.

Hak larangan diskriminasi, hak pribadi adalah hak-hak setiap individu yang layak untuk dimiliki oleh semua orang, hal-hal tersebut adalah hak asasi manusia yang klasik biasa juga disebut sebagai hak sipil, dan hak politik. Hak tersebut mencakup hak atas kebebasan berekspresi, hak atas properti, hak atas kebebasan, hak atas kebebasan pendudukan, dan lain-lain. Mereka biasanya dirumuskan dalam istilah umum yang tidak membedakan orang berdasarkan ras,

agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau alasan lain semacam itu. Hak pribadi dapat diklaim oleh setiap individu, dan individu itu sendiri yang diizinkan untuk kehilangan hak tersebut.

Di Israel, beberapa hak pribadi telah diakui oleh undang-undang. Salah satu contohnya adalah *Basic Law: Human Dignity and Liberty* yang dalam bagian 2 menyatakan bahwa “tidak boleh ada pelanggaran terhadap kehidupan, tubuh atau martabat setiap individu”, dan di bagian 3 menyatakan bahwa “tidak akan ada pelanggaran terhadap properti seseorang”, Contoh lainnya adalah pengakuan hukum atas kebebasan berekspresi sebagai hak dasar.

Bahwa minoritas Arab berhak atas persamaan di depan hukum dalam bidang hak-hak pribadi. Hal ini juga dijanjikan dalam Deklarasi Pembentukan Negara Israel, yang ditandatangani pada tahun 1948 dan menyatakan bahwa “Negara Israel akan memastikan kesetaraan hak sosial dan politik bagi semua rakyatnya tanpa memandang agama, ras, atau jenis kelamin. ” Deklarasi tersebut juga menghimbau kepada penduduk Arab di Negara Israel untuk menjaga perdamaian dan berpartisipasi dalam pembangunan negara atas dasar kewarganegaraan penuh dan setara serta perwakilan yang sesuai di semua lembaga sementara dan permanennya. Prinsip kesetaraan adalah salah satu prinsip terpenting dan sentral dalam hukum konstitusional Israel. Kesetaraan, lebih dari nilai lainnya, adalah penyebut dan dasar umum untuk semua hak dasar individu, serta semua nilai lain yang menjadi dasar demokrasi (Lavie, 2018).

Sementara itu *Basic Law Jewish Nation State* yang disahkan pada tahun 2018, terlihat jelas melanggar dua aturan-aturan tersebut di mana aturan tersebut

dengan jelas menjamin kesetaraan hak sipil, kebebasan antar seluruh golongan, sementara *Basic Law* yang baru disahkan tersebut justru membawa Israel ke arah yang jauh dari kata kebebasan dan demokrasi liberal dimana hal tersebut menjadi jaminan dari aturan-aturan yang telah ada sebelumnya, *Basic Law Jewish Nation State* justru semakin membawa Israel ke arah majoritarianisme otoriter, di mana kelompok mayoritas dalam negara tersebut memiliki keistimewaan yang lebih dan mengendalikan sebagian besar sektor kehidupan dalam negara yang menciderai hak-hak kelompok minoritas seperti etnis Arab di negara Israel.

Breaking free of rules, adalah tahap terakhir dalam menentukan kesuksesan suatu tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi. Tiga tahapan yang menentukan suksesnya suatu sekuritisasi yaitu melabeli suatu isu dengan ancaman eksistensial (*existential threat*), melakukan tindakan pencegahan darurat untuk melindungi suatu kepentingan dari ancaman nyata (*emergency action*), dan bertindak diluar batas normal atas nama keamanan dengan wewenang yang dimilikinya (*breaking free of rules*).

Sederhananya, teori sekuritisasi berfokus pada peran aktor sekuritisasi seperti para pemimpin politik dalam mengartikulasikan dan memberi label ancaman terhadap suatu isu, dan menekankan bagaimana posisi kekuasaan aktor sekuritisasi atas publik yang lebih luas dengan wewenang dan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan negara yang membuat mereka menjadi aktor sekuritisasi (Siddharth, 2015).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Israel merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya, dengan keadaan demografis yang terdiri dari berbagai macam etnis dan agama, Israel juga adalah negara multikultural dengan penduduk Yahudi menjadi mayoritas penduduk di Israel. Dengan sistem demokrasi yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai liberalisme, kebebasan dan jaminan hak setiap individu dalam masyarakat Israel sepatutnya menjadi landasan Israel sebagai negara demokratis dalam menjalankan pemerintahan dalam kasus ini periode Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Salah satu nilai yang dimiliki dalam suatu negara demokratis adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, dan tingginya tingkat toleransi terhadap kelompok minoritas dalam suatu masyarakat negara demokratis.

Etnis minoritas Arab-Israel yang merupakan bagian satu perlima dari keseluruhan penduduk Israel menjadi salah satu kelompok masyarakat yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam negeri sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 dan isu terkait kelompok minoritas sering diangkat dan digunakan sebagai tujuan untuk suatu kepentingan salah satunya kepentingan politik dalam pemilu pada tahun 2019 di mana Benjamin Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri.

Dengan menggunakan teori sekuritisasi dari Buzan, penulis menganalisis isu dalam pemilihan umum tahun 2019 di Israel dan hubungan kekuasaan Perdana

Menteri Benjamin Netanyahu dan kelompok minoritas Arab-Israel dengan menggunakan tiga variabel yang menurut Buzan merupakan variabel penting dalam kesuksesan dalam menganalisis menggunakan teori sekuritisasi yaitu *existential threat*, *emergency action* dan *breaking free of rules*.

Variabel pertama yaitu *existential threat*. Penulis melihat langkah awal sekuritisasi yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu terhadap kelompok minoritas Arab-Israel pada masa kampanye pemilu 2019 dengan wewenang dan kapasitas serta pengaruh Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri, Ia dapat dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu dalam kasus ini, masyarakat Yahudi mayoritas. Dengan menyebarkan informasi dan menarasikan secara rutin terutama dalam masa kampanyenya terhadap kelompok minoritas Arab-Israel. Dengan sengaja melakukan *speech act* terhadap etnis Arab-Israel bertujuan mendesain suatu kelompok minoritas sebagai ancaman eksistensial bagi negara Israel. Melalui narasi yang dibangun dengan memburuk-burukkan (*demonizing*) kelompok minoritas Arab-Israel serta gaya kampanye anti-Arab, dengan menyebutkan bahwa kelompok minoritas Arab di Israel berniat menghancurkan Israel. *Speech act* yang dilakukan oleh Netanyahu tersebut terhadap kelompok minoritas Arab-Israel dilakukan untuk menguatkan posisinya dan berusaha mendapatkan dukungan penuh dari kelompok mayoritas Yahudi Israel dalam pemilu Israel 2019.

Pada variabel kedua yaitu *emergency action*, dengan disahkannya *Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People*, yang memiliki fungsi yang sama sebagai konstitusi suatu negara, menjadi langkah pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu untuk membatasi kebebasan kelompok

minoritas Arab-Israel dengan penduduk Arab-Israel yang merasa semakin di diskriminasi oleh kebijakan tersebut dan merasa posisi mereka di Israel sebagai masyarakat kelas dua, setelah mayoritas Yahudi Israel. Langkah tersebut juga mengancam nilai-nilai demokrasi yang ada di Israel yang menjamin pemenuhan hak sosial dan politik setiap warga negaranya.

Pada variabel ketiga yaitu *breaking free of rules*, penulis menemukan bahwa terjadi pelanggaran aturan atas disahkannya *Basic Law Jewish Nation State*, dengan nilai-nilai yang di bawa dalam *Basic Law Jewish Nation State* bertolak belakang dengan peraturan yang telah ada jauh sebelumnya, yaitu *Basic Law Dignity and Liberty* dan Deklarasi Pembentukan Negara Israel, yang ditandatangani pada tahun 1948 yang menjamin kesetaraan hak sosial dan politik bagi semua penghuninya tanpa memandang agama, ras, atau jenis kelamin.

Dengan menyimpulkan bahwa sekritisasi yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu terhadap etnis minoritas Arab-Israel dalam pemilu 2019 dengan tujuan mendapatkan dukungan dan suara penuh dari kelompok mayoritas tidak berhasil. Tidak tercapainya tujuan Netanyahu untuk memenangkan pemilu 2019 Israel dengan sampai penelitian ini dilakukan, Pemilu Israel yang dimulai pada April 2019 masih belum berakhir dengan tidak adanya hasil mutlak dan terbentuknya pemerintahan baru serta Perdana Menteri yang akan memimpin Israel.

Pada tiga variabel analisis di atas menunjukkan upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berusaha kembali tetap mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri, juga upaya sekritisasi dalam kampanye yang mengancam nilai-nilai demokrasi di Israel dengan melabeli dan narasi yang di

bangun terhadap kelompok masyarakat etnis Arab-Israel sebagai ancaman bagi kedaulatan negara Israel yang ditujukan terhadap *audiens* yaitu mayoritas Yahudi Israel, di dorong motif kuat Benjamin Netanyahu untuk berlindung dari dakwaan kasus korupsi terhadapnya dengan kembali menjabat sebagai Perdana Menteri dan mendapatkan imunitas dari Parlemen Israel, Knesset.

Yang terpenting dalam sekuritisasi adalah *speech act*, di mana aktor sekuritisasi Benjamin Netanyahu mendefinisikan suatu ancaman melalui narasi yang dibangunnya, dengan cara-cara tertentu seperti pidato publik secara langsung, dan menggunakan media sosial untuk mengangkat suatu isu menjadi masalah keamanan yang dirasa perlu untuk ditindak lanjuti, dan diperlukan tindakan pencegahan khusus untuk melindungi suatu kelompok dari ancaman tersebut, yang di mana hal tersebut berarti keamanan dapat tercipta jika Benjamin Netanyahu kembali berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri Israel.

4.2. Saran dan Masukan

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian yang telah dijelaskan di atas penulis menyadari keterbatasan cakupan penelitian yang hanya terbatas dalam kajian domestik negara Israel pada tahun 2019. Sebagai langkah lanjut dalam penelitian ini saran kepada peneliti lainnya dapat membahas strategi politik Benjamin Netanyahu dan upayanya untuk kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Israel, mengingat sampai dengan penelitian ini ditulis, belum ada pemerintahan baru yang terbentuk di Israel karena tidak ada kesepakatan partai koalisi yang tercapai. Serta peneliti lain juga dapat meneliti bagaimana dampak

kebangkitan nasionalisme di berbagai negara terhadap etnis-etnis minoritas, serta peran etnis minoritas dalam proses pemilihan umum di suatu negara demokratis.



Daftar Pustaka

- Alexia Underwood. (2019, February 28). *Israeli Prime Minister Netanyahu to be indicted on bribery charges pending hearing - Vox. Vox.*
<https://www.vox.com/2019/2/28/18243493/israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-indictment-bribery-fraud>
- AP. (2019, May 31). *Netanyahu shows off Trump's map of Israel with Golan Heights.* Associate Press.
<https://apnews.com/article/ef20ca5bb83540a7b03702c76406b4e6>
- Aron Heller. (2019a, March 9). *Netanyahu campaign draws accusations of incitement.*
<https://apnews.com/article/d7030e50d5ae4c47bb629901b9793ea8>
- Aron Heller. (2019b, November 21). *A look at the corruption scandals facing Israel's Netanyahu.* AP News.
<https://apnews.com/article/af91f7095bb44745aff139001a9ef725>
- Ayyub, R. (2019, september 19). *Newsmaker: The anti-Netanyahu? Ex-general Gantz poised for top office.* Oslo, Norway.
- Bard Mitchell. (n.d.). *Background & Overview of Israel's Security Barriers.* Retrieved January 26, 2021, from
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/background-and-overview-of-israel-s-security-fence>
- BBC. (2018, July 19). *Jewish nation state: Israel approves controversial bill - BBC News.* <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44881554>
- Ben White. (2018, July 23). *Jewish Nation State Law: Why Now? | Institute for Palestine Studies.* Palestine Studies. <https://www.palestine-studies.org/en/>
- Benjamin "Bibi" Netanyahu.* (n.d.). Retrieved January 26, 2021, from
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/benjamin-quot-bibi-quot-netanyahu>

- Benn, A. (2019, september 16). Israel Election: Tell Us Which Minority You Hate, and We'll Tell You Who to Vote For.
- Buzan, B. W. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Bill Chappell, D. E. (2019, March 11). *Netanyahu Says Israel Is 'Nation-State Of The Jewish People And Them Alone'* : NPR.
<https://www.npr.org/2019/03/11/702264118/netanyahu-says-israel-is-nation-state-of-the-jewish-people-and-them-alone>
- Caroline Alexander, A. T. (2019, March 13). *Netanyahu Tells Arab Citizens They're Not Real Israelis* - Bloomberg. Bloomberg.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-13/netanyahu-tells-arab-citizens-they-re-not-real-israelis>
- Dina Badie. (2019, March 25). *Why Trump's recognition of the Golan Heights as Israeli territory matters*. The Conversation.
<https://theconversation.com/why-trumps-recognition-of-the-golan-heights-as-israeli-territory-matters-114132>
- Dov Woxman. (2018, July 23). *Israel's new nation-state law restates the obvious*. The Conversation. <https://theconversation.com/israels-new-nation-state-law-restates-the-obvious-100310>
- Eroukhmanoff, C. (2018). *Securitisation Theory: An Introduction – E-International Relations*. 1–4. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Hareetz. (2015, March 17). P.M. Netanyahu Facebook video “Right wing gov't in danger Arabs voting in droves” - YouTube. Hareetz.
https://www.youtube.com/watch?v=ERc6hi_F9LA
- Haretz. (2017). (58) Who are the Netanyahu supporters? | at the Netanyau rally - YouTube. Hareetz.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=D3Y2yOcKsPg>
- Holmes, O. (2019, May 11). *Israel president rejects Netanyahu comments about Arab citizens* | Israel | *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/israel-president-rejects->

netanyahu-comments-about-arab-citizens

Holmes, O. (2019, september 18). Arab turnout in Israel election rises despite racist campaigns. Tel Aviv, Israel.

Khalidi, A. S. (2011). Why Can't the Palestinians Recognize the Jewish state? *Journal of Palestine Studies* , Vol. 40, No. 4, 78-81.

Ian Parmeter. (2020, February 17). *Israel's democracy: a systemic problem* | *The Interpreter*. The Interpreter. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/israel-s-democracy-systemic-problem>

ICS. (2014). *Identity Crisis: Israel and Its Arab Citizens* | *Crisis Group*. <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/identity-crisis-israel-and-its-arab-citizens>

Julian Borger. (2019, March 21). *Trump says US will recognize Israel's sovereignty over Golan Heights* | *US foreign policy* | *The Guardian*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/us-news/2019/mar/21/trump-us-golan-heights-israel-sovereignty>

Kate Lyons, K. R. (2019, September 19). *Israel election: Netanyahu says country at "historic junction" as early results too close to call – live news* | *World news* | *The Guardian*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/live/2019/sep/17/israeli-election-close-result-expected-as-netanyahu-seeks-fifth-term-live-news>

Knesset Elections Results - Twentieth Knesset. (n.d.). Retrieved January 26, 2021, from https://knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res20.htm

Latest Population Statistics for Israel. (n.d.). Retrieved February 21, 2021, from <https://www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel>

Lintl, P., & Wolfrum, S. (2018). *Israel's Nation-State Law. Netanyahu Government Lays the Foundations for a Majoritarian System*.

Michael Bachner. (2019, March 10). *Amid Likud's "Bibi or Tibi" campaign, ADL slams "demonization" of Israeli Arabs* | *The Times of Israel*.

<https://www.timesofisrael.com/adl-criticizes-politicians-demonization-of-israeli-arabs/>

Michael Safi, O. H. (2019, September 11). *Arab leaders denounce Netanyahu's plan to annex Palestinian territories* | World news | *The Guardian*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/11/arab-leaders-denounce-netanyahu-plan-annex-palestinian-territories-israel>

Ben Lynfield. (2018, March 10). Israel's Jews and Arab Minority Further Apart than Ever, Poll Says - Abraham Initiatives. Abraham Initiatives. <https://abrahaminitiatives.org/israels-jews-and-arab-minority-further-apart-than-ever-poll-says/>

Doron Matza. (2017). Patterns of Resistance among Israel's Arab-Palestinian Minority: A Historical Review and a Look to the Future | INSS. The Institute for National Security Studies. <https://www.inss.org.il/publication/patterns-resistance-among-israels-arab-palestinian-minority-historical-review-look-future/>

Mitchell Bard. (2021). *The Status of Arabs in Israel*. Jewish Virtual Library. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-status-of-arabs-in-israel>

Noga Tarnopolsky. (2019, September 14). *Netanyahu, fighting for political survival, attacks Arabs as election nears* - *Los Angeles Times*. Los Angeles Times. <https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-09-14/netanyahu-election-israel-arab-population>

Neuberger, B. (2004). Neuberger, B. (2004). The Arab Minority in Israeli Politics: Between 'Ethnic Democracy' and 'Democratic Integration'. In *Democracy and Ethnic Conflict* (pp. 52-79). Palgrave Macmillan, London. *Palgrave Macmillan, London., 52-75.*

Neuberger, B. (2004). The Arab Minority in Israeli Politics: Between 'Ethnic Democracy' and 'Democratic Integration'. London: Palgrave Macmillan.

Oliver Holmes. (2019, September 12). *Facebook penalises Netanyahu page over hate speech violation* | Benjamin Netanyahu | *The Guardian*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/12/facebook-disables-netanyahu-page-bot-over-hate-speech-violation>

- Peled, M. (1975). The Arab Minority in Israel. *MERIP Reports*, 19(41), 18.
<https://doi.org/10.2307/3693716>
- Raoul Wootliff. (2018, June 18). *Final text of Jewish nation-state law, approved by the Knesset early on July 19 | The Times of Israel*.
<https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-become-law/>
- Raoul Wootliff. (2019, May 30). *The final results of April's election are in: No one won, Netanyahu lost | The Times of Israel*. The Times of Israel.
<https://www.timesofisrael.com/the-final-results-of-aprils-election-are-in-no-one-won-netanyahu-lost/>
- Reuters. (2019, April 9). *Israelis go to polls in election, as hidden cameras banned after Arab minority complaints*. Arab News.
<https://www.arabnews.com/node/1479871/middle-east>
- Roe, P. (2004). Securitization and minority rights: Conditions of desecuritization. *Security Dialogue*, 35(3), 279–294.
<https://doi.org/10.1177/0967010604047527>
- Siddharth, S. (2015). What is Security Securitization Theory and its Application in Turkey. *E-International Relations*, 29–30.
- Susan Rolef. (2020, May 16). *Netanyahu's perception of democracy is full of factual mistakes – opinion - The Jerusalem Post*. The Jerusalem Post.
<https://www.jpost.com/opinion/netanyahus-perception-of-democracy-is-full-of-factual-mistakes-opinion-638875>
- Smootha. (1990). Minority status in an ethnic democracy: The status of the arab minority in israel. *Ethnic and Racial Studies Volume 13 Number 3*, 37-41.
- Smootha, S. (2002). The Arab Minority in Israeli Politics: Between 'Ethnic Democracy' and 'Democratic Integration'. In S. Smootha, *Nations and Nationalism* (p. 476). Haifa: University of Haifa.
- Smootha, S. (2002). The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state. *Nations and nationalism*, 475-480.
- The Guardian. (2019, November 19). *The Guardian view on Israeli settlements:*

still illegal / Israel / The Guardian. The Guardian.

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/19/the-guardian-view-on-israeli-settlements-still-illegal>

Waxman, D. (2019, september 18). The 4 big questions that the next Israeli government will decide. Massachusetts, Boston, United States of America.

Yoav Peled, D. N. (2005). Ethnic Democracy Revisited: On the State of Democracy in the Jewish State. *Israel Studies Forum*, Vol. 20, No. 1 , 3-27.

Yardena Schwartz. (2019, September 21). *How Netanyahu's campaign against Israel's Arab citizens backfired*. NBC News.

<https://www.nbcnews.com/news/world/how-netanyahu-s-campaign-against-israel-s-arab-citizens-backfired-n1056826>

Ynet, A. (2018, March 11). *Wonder Woman takes on Netanyahu in row over Israeli Arab rights*. <https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5476850,00.html>

Zack Beauchamp. (2019, September 18). *Israel election results: who won, who didn't, and what comes next - Vox*. Vox. <https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/9/18/20871949/israel-election-results-who-won-benjamin-netanyahu>